



KAJIAN

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BAPPELITBANGDA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama
dengan Universitas Lambung Mangkurat

2025

EXECUTIVE SUMMARY

Kajian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) merupakan kolaborasi antara BAPPELITBANGDA Kabupaten HSS, Universitas Lambung Mangkurat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kajian ini dilaksanakan untuk mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem dan menyediakan dasar yang kuat bagi perencanaan kebijakan daerah.

Studi ini menggunakan pendekatan mixed methods, memadukan analisis kuantitatif berbasis data P3KE, DTKS, dan Regsosek dengan data kualitatif dari survei rumah tangga, wawancara, FGD, dan observasi di 11 desa prioritas. Melalui analisis klaster dan SWOT, kajian ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik kerentanan, faktor penyebab kemiskinan ekstrem, serta strategi intervensi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

TEMUAN UTAMA



Tingkat kemiskinan ekstrem rendah tetapi menyimpan kantong kerentanan.

HSS mencatat sekitar 0,6% kemiskinan ekstrem, namun wilayah 3 Daha dan Loksado masih menghadapi keterbatasan layanan dasar, kondisi perumahan tidak layak, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi.



Masalah akurasi data dan under-reporting.

Terdapat ketidaksinkronan antara P3KE, DTKS, dan Regsosek. Beberapa rumah tangga tidak melaporkan penghasilan tambahan, sehingga status kemiskinan ekstrem tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.



Ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Program seperti PKH, BPNT, dan BLT membantu kebutuhan dasar, tetapi dalam beberapa kasus menciptakan ketergantungan jangka panjang yang menghambat transisi menuju kemandirian ekonomi.



Kapasitas usaha dan literasi finansial rendah.

Banyak rumah tangga belum berani memulai usaha kecil karena keterbatasan keterampilan, akses modal, dan kepercayaan diri.



Kualitas pendidikan dan risiko putus sekolah.

Sebagian anak dari keluarga miskin ekstrem berisiko putus sekolah karena kendala ekonomi dan geografis, terutama di wilayah Loksado dan tiga Daha.



Faktor kultural ikut mempengaruhi kemiskinan.

Persepsi bantuan sebagai "hak tetap" membuat perubahan perilaku ekonomi menjadi lebih sulit. Intervensi penguatan mindset dan edukasi keuangan diperlukan.

HASIL ANALISIS KLASTER

Kajian menghasilkan tiga klaster utama rumah tangga miskin ekstrem:

- Klaster 1: Deprivasi Layanan Dasar, Rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, air bersih terbatas, akses pendidikan dan kesehatan rendah.
- Klaster 2: Pekerja Informal Berbasis Potensi Lokal Penghasilan rendah tetapi memiliki peluang ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan usaha mikro.
- Klaster 3: Rumah Tangga Stabil tetapi Rentan, Kondisi dasar cukup baik namun ketergantungan terhadap bantuan sangat tinggi.

ANALISIS SWOT

Beberapa temuan strategis dari SWOT:

- Kekuatan: solidaritas sosial, potensi ekonomi lokal, dukungan kuat pemerintah pusat-daerah.
- Kelemahan: integrasi data belum optimal, literasi finansial rendah, dan ketergantungan bantuan.
- Peluang: akses pembiayaan mikro, program nasional pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar.
- Ancaman: inflasi pangan, keterbatasan infrastruktur, risiko stagnasi pendidikan dan kesehatan.

ARAH STRATEGI PENANGANAN

Jangka Pendek (≤ 12 bulan):

- Integrasi dan verifikasi data DTKS-P3KE-Regsosek.
- Perbaikan targeting bantuan sosial by name by address.
- Program perbaikan rumah dan sanitasi untuk klaster 1.
- Penanganan risiko putus sekolah secara cepat.

Jangka Menengah-Panjang:

- Graduation program untuk mengurangi ketergantungan bantuan.
- Pendampingan UMKM dan akses modal untuk klaster 2.
- Peningkatan infrastruktur dasar di tiga Daha dan Loksado.
- Penguatan TKPK dan koordinasi lintas sektor.
- Integrasi strategi ke dalam RPJMD dan Rencana Aksi Daerah PKE.

KESIMPULAN

Meskipun angka kemiskinan ekstrem di HSS relatif rendah, kerentanan sosial-ekonomi dan keterbatasan layanan dasar masih nyata di sejumlah wilayah. Tantangan terbesar bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi kombinasi faktor struktural, kultural, dan individual. Dengan intervensi berbasis klaster dan perbaikan tata kelola data, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpotensi besar mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, Kajian Strategi Pengangulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Hulu Sungai Selatan” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil kerja sama antara BAPPELITBANGDA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat, yang bersama-sama berkomitmen mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Kajian ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menawarkan strategi penanganan yang berbasis data dan relevan dengan kondisi lokal. Analisis dilakukan melalui pendekatan *mixed methods*, menggabungkan data kuantitatif dari P3KE, DTKS, Regsosek, serta data kualitatif hasil wawancara, FGD, dan observasi lapangan di desa-desa prioritas. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang situasi rumah tangga miskin ekstrem, karakter kerentanan per wilayah, serta tantangan implementasi program penanggulangan kemiskinan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, terutama perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta rumah tangga penerima manfaat yang telah bersedia menjadi responden dalam proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim peneliti dari Universitas Lambung Mangkurat atas dedikasi dan kerja keras dalam memastikan kualitas kajian ini.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis, baik dalam penyusunan RPJMD, Rencana Aksi Daerah Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (RAD-PKE), maupun program lintas sektor lainnya. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat nyata dan turut mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kandangan, 30 November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan dan Isu Strategis	2
1.3. Tujuan Kajian	5
1.4. Manfaat Kajian	7
1.5. Ruang Lingkup Kajian	8
1.5.1. Wilayah Kajian dan Fokus Geografis	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	10
2.1. Definisi Kemiskinan Ekstrem	10
2.2. Teori dan Faktor Penyebab Kemiskinan	12
2.3. Kerangka Nasional Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	15
2.4. Pendekatan Analitis: SWOT dan <i>Clustering</i>	19
BAB III	25
METODE KAJIAN	25
3.1. Design Penelitian	25
3.2. Sumber Data	25
3.2.1. Data Primer	26
3.2.2. Data Sekunder	26
3.3. Penentuan Sampel dan Lokasi	26
3.3.1. Lokasi Penelitian	26

3.3.2.	Dasar Penentuan Sampel	27
3.3.3.	Jumlah Sampel.....	28
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	29
3.5.	Teknik Analisis Data.....	30
3.5.1.	Analisis Kuantitatif	30
3.5.2.	Analisis Kualitatif.....	31
3.6.	Validitas dan Reliabilitas	32
3.7.	Etika Penelitian.....	32
BAB IV	34
GAMBARAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	34
4.1.	Kondisi Wilayah dan Demografi.....	34
4.1.1.	Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	34
4.1.2.	Luas Wilayah dan Topografi	36
4.1.3.	Iklim dan Hidrologi.....	37
4.1.4.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	38
4.1.5.	Komposisi Penduduk	39
4.2.	Kondisi Ekonomi dan Sosial.....	40
4.2.1.	Struktur Perekonomian (PDRB).....	40
4.2.2.	Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan	41
4.2.3.	Sektor Unggulan Daerah	42
4.2.4.	Kondisi Sosial dan Kelembagaan Masyarakat.....	43
4.3.	Kondisi Kemiskinan dan Layanan Dasar	44
4.3.1.	Tren Kemiskinan 2019–2025	44
4.3.2.	Akses terhadap Layanan Dasar	46
BAB V	48
ANALISIS DATA, TEMUAN KAJIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1.	Temuan Hasil Lapangan	48
4.1.1.	Temuan Utama Per Desa	48
4.1.2.	Pola - Pola Utama Kemiskinan Ekstrem di Desa Sampel	49

4.1.3. Analisis <i>Cluster</i> Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	52
4.2. Analisis SWOT Program Penanggulangan Kemiskinan	56
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	63
4.3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	64
4.3.2. Pilar Strategi Utama	65
4.3.3. Strategi Jangka Pendek (≤ 12 Bulan).....	70
BAB VI.....	80
REKOMENDASI DAN PENUTUP	80
6.1. Rekomendasi Kebijakan Daerah	80
6.2. Kesimpulan Umum.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alur Analisis dan Metode Pengolahan Data Kajian Kemiskinan Ekstrem	23
Tabel 2. Jumlah Responden Perdesa.....	28
Tabel 3. Jumlah Penduduk per Kecamatan (Data 2024)	38
Tabel 4. Ringkasan Temuan Lapangan Per Desa.....	51
Tabel 5. Akar Persoalan <i>Cluster</i> 1 dan Implikasi Kebijakan Utama	52
Tabel 6. Akar Persoalan <i>Cluster</i> 2 dan Implikasi Kebijakan Utama	53
Tabel 7. Akar Persoalan <i>Cluster</i> 3 dan Implikasi Kebijakan Utama	54
Tabel 8. Integrasi <i>Cluster</i> dengan Arah Kebijakan Makro dan Mikro.....	55
Tabel 9. Matriks SWOT Penurunan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	56
Tabel 10. Skoring Strength.....	57
Tabel 11. Skoring Weakness	58
Tabel 12. Skoring Opportunity	59
Tabel 13. Skoring Threats.....	60
Tabel 14. Best Practices Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia	75

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan ekstrem merupakan salah satu isu pembangunan paling mendesak di Indonesia yang menjadi fokus prioritas nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam arahan Presiden Republik Indonesia dan Strategi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Stranas-PKE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 2022) Stranas-PKE menekankan tiga pilar utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu: (1) *perluasan perlindungan sosial*, (2) *peningkatan produktivitas masyarakat miskin*, dan (3) *penurunan beban pengeluaran rumah tangga*. Secara nasional, kemiskinan ekstrem didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai kondisi ketika pengeluaran per kapita seseorang berada di bawah US\$1,90 Purchasing Power Parity (PPP) per hari, atau sekitar Rp11.300 per orang per hari pada harga konstan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Meskipun angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan utama masih terletak pada kelompok rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah perdesaan dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar.

Di tingkat provinsi, Kalimantan Selatan termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang relatif rendah dibanding rata-rata nasional, namun masih terdapat kantong-kantong kerentanan yang signifikan di beberapa kabupaten. Berdasarkan data Profil Kemiskinan Kalimantan Selatan September 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2025), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menempati posisi dengan tingkat kemiskinan ekstrem sekitar 0,6%, sedangkan kemiskinan umum berada pada kisaran 3,12%. Angka ini menempatkan HSS di antara tiga kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi ini, bersama Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru. Walaupun secara statistik tergolong rendah, pemerintah daerah HSS masih menghadapi tantangan substantif dalam memastikan bahwa rumah tangga miskin ekstrem benar-benar terjangkau oleh program intervensi. Salah satu isu utama yang muncul dari studi lapangan adalah

belum terintegrasinya sistem data kemiskinan antar basis, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikelola Kemenko PMK, serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikembangkan oleh BPS. Perbedaan format, frekuensi pembaruan, dan metode verifikasi di antara ketiga basis data tersebut menyebabkan inkonsistensi dan potensi tumpang tindih data penerima manfaat, terutama pada level desa.

Selain persoalan integrasi data, tantangan lainnya terletak pada proses validasi penghasilan rumah tangga miskin, terutama terkait penghasilan sampingan dan kontribusi anggota keluarga yang bukan kepala rumah tangga. Temuan dari *Focus Group Discussion* (FGD) awal menunjukkan adanya praktik *under-reporting*, yaitu sebagian rumah tangga tidak melaporkan seluruh sumber pendapatannya, termasuk penghasilan dari kegiatan informal seperti menangkap ikan, menjual hasil kebun, atau pekerjaan sambilan. Kondisi ini membuat pengukuran kesejahteraan menjadi bias sehingga beberapa keluarga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria miskin ekstrem tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Temuan ini kembali menguat pada FGD kedua, yang mengindikasikan bahwa ketidakakuratan data penghasilan masih menjadi persoalan struktural. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan dan budaya ketergantungan pada bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT menambah kompleksitas penanganan kemiskinan ekstrem di HSS. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kultural, dan tata kelola data. Karena itu, diperlukan kajian strategis yang mampu menjawab berbagai dimensi tersebut agar kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan selaras dengan kerangka nasional.

1.2. Permasalahan dan Isu Strategis

1. Ketidaktepatan Data dan Under-Reporting Penghasilan

Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah akurasi dan validitas data penghasilan rumah tangga miskin ekstrem. Dalam proses pendataan oleh P3KE dan DTKS, ditemukan adanya praktik *under-reporting*, yaitu rumah tangga tidak melaporkan seluruh sumber penghasilannya, khususnya penghasilan sampingan seperti kegiatan menangkap ikan, menjual hasil kebun, atau pekerjaan informal anggota keluarga non-kepala rumah tangga. Akibatnya, pengukuran tingkat

kesejahteraan menjadi bias, dan terdapat kemungkinan keluarga yang tidak sepenuhnya miskin ekstrem tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan perlunya verifikasi lapangan berbasis rumah tangga (*household-based validation*), bukan hanya berbasis kepala keluarga, agar data kemiskinan ekstrem lebih akurat dan representatif (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2025)

2. Ketergantungan terhadap Bantuan Sosial (PKH dan BLT)

Hasil survei lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin ekstrem di HSS masih sangat bergantung pada bantuan sosial tunai, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini memang menjaga konsumsi dasar tetap terpenuhi, namun dalam jangka panjang ketergantungan yang terlalu kuat dapat mengurangi dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi. Temuan ini sejalan dengan analisis Suryahadi et al., (2020), yang menyimpulkan bahwa program bantuan sosial tanpa mekanisme pemberdayaan berpotensi menghambat mobilitas ekonomi penerima manfaat. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) kedua menguatkan fenomena tersebut. Dalam diskusi, perangkat desa dan pendamping sosial menyampaikan bahwa sebagian masyarakat menganggap bantuan sebagai hak permanen, bukan sebagai instrumen sementara untuk keluar dari kerentanan. Pola pikir ini membuat sebagian rumah tangga enggan mengambil peluang usaha baru atau meningkatkan kapasitas ekonominya. Karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di HSS membutuhkan pendekatan *graduation program*, yaitu mekanisme pendampingan terarah agar rumah tangga penerima bantuan dapat secara bertahap keluar dari ketergantungan sosial dan bertransisi menuju kemandirian ekonomi. Pendekatan ini menekankan kombinasi perlindungan sosial, peningkatan kapasitas usaha, dan dukungan layanan dasar sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan.

3. Rendahnya Keberanian dan Kapasitas Usaha Rumah Tangga

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya keberanian, keterampilan, dan kapasitas usaha produktif di kalangan rumah tangga miskin ekstrem. Temuan wawancara lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden yang berani memulai usaha mikro, termasuk di desa-desa yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi lokal seperti peternakan kambing, perdagangan kecil, dan

pemanfaatan hasil kebun (hasil survei lapangan). Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di HSS tidak semata-mata berkaitan dengan kekurangan modal, tetapi lebih dipengaruhi oleh rendahnya literasi finansial, keterampilan teknis usaha, serta kepercayaan diri masyarakat dalam mengambil risiko ekonomi.

Situasi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak dapat efektif tanpa peningkatan kapasitas manusia dan dukungan pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan ke depan perlu menempatkan pelatihan kewirausahaan dasar, pendampingan usaha mikro, serta fasilitasi akses pembiayaan ringan sebagai prioritas utama, sebagaimana juga direkomendasikan dalam kerangka Stranas-PKE (

4. Kualitas Pendidikan dan Risiko Putus Sekolah

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor struktural yang memperkuat lingkaran kemiskinan ekstrem di HSS. Temuan survei lapangan menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga miskin ekstrem hanya menamatkan pendidikan dasar (SD), sehingga memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan dengan pendapatan stabil. Di beberapa desa seperti Baruh Jaya dan Tambangan, anak-anak bahkan berisiko putus sekolah akibat kendala biaya transportasi dan tekanan ekonomi keluarga (hasil FGD kedua). Meskipun banyak anak memiliki ponsel pintar, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan literasi digital atau kualitas pembelajaran. Akses terhadap teknologi belum diiringi dengan pendampingan belajar maupun pemanfaatan perangkat untuk kegiatan edukatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan formal belum diimbangi oleh dukungan biaya, motivasi, dan bimbingan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan pendidikan, tetapi juga pada pendidikan keluarga, pendampingan belajar, serta insentif sekolah berkelanjutan untuk memastikan anak-anak dari rumah tangga miskin ekstrem tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

5. Faktor Kultural dan Kenyamanan terhadap Bantuan Sosial

Faktor kultural juga memainkan peran penting dalam membentuk pola kemiskinan ekstrem di HSS. Di beberapa desa rural seperti Muning Baru dan Pakan Dalam, masyarakat menunjukkan kenyamanan terhadap pola bantuan sosial dan

cenderung kurang terdorong untuk mencari sumber penghasilan yang lebih mandiri (hasil FGD kedua). Fenomena ini mencerminkan ketergantungan sosial yang bersifat kultural, di mana bantuan dipersepsikan sebagai dukungan permanen dari negara, bukan sebagai instrumen sementara untuk membantu keluarga keluar dari kerentanan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya perubahan pola pikir melalui strategi komunikasi sosial yang lebih terarah. Edukasi publik harus menekankan pentingnya kerja keras, pendidikan, dan kemandirian ekonomi sebagai indikator keberhasilan program pengentasan kemiskinan, sebagaimana ditegaskan dalam literatur pembangunan (Todaro & Smith, 2015). Pendekatan ini diharapkan dapat membangun motivasi internal masyarakat sehingga intervensi ekonomi dan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Tujuan Kajian

Kajian ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sekaligus merumuskan strategi penanganannya secara terarah, berbasis data, dan berkelanjutan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mendukung upaya Pemerintah Kabupaten HSS dalam mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% sebagaimana ditetapkan dalam *Strategi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Stranas-PKE)* yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Secara khusus, kajian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan:

a. Mengidentifikasi profil kemiskinan ekstrem berbasis data dan lapangan

Tujuan pertama adalah melakukan identifikasi dan pemetaan kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten HSS berdasarkan data kuantitatif dan temuan kualitatif lapangan. Proses ini melibatkan analisis data P3KE 2024, DTKS, serta hasil survei rumah tangga miskin ekstrem dan wawancara dengan perangkat desa dan penerima bantuan. Melalui pendekatan ini, kajian diharapkan dapat menggambarkan profil sosial-ekonomi, pola pengeluaran, kondisi hunian, serta akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi) dari rumah tangga miskin ekstrem di berbagai wilayah. Identifikasi ini menjadi fondasi penting dalam menentukan wilayah prioritas intervensi, sekaligus

memperbaiki akurasi data penerima manfaat agar lebih sinkron antara basis data pusat (Kemensos, BPS) dan daerah (P3KE).

- b. Menganalisis klaster wilayah kemiskinan ekstrem dan karakter sosial-ekonominya
 Tujuan kedua adalah melakukan analisis klaster (*Cluster analysis*) untuk mengelompokkan wilayah atau desa berdasarkan kesamaan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga miskin ekstrem. Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan variabel-variabel seperti pendapatan per kapita, kondisi fisik rumah, akses terhadap listrik dan air bersih, tingkat pendidikan kepala keluarga, serta ketergantungan terhadap bantuan sosial. Melalui metode ini, kajian akan menghasilkan tiga kelompok utama (klaster): (1) wilayah dengan deprivasi layanan dasar, (2) wilayah dengan potensi ekonomi informal namun rentan pendapatan, dan (3) wilayah rumah tangga yang relatif stabil tetapi masih bergantung pada bantuan sosial. Analisis klaster ini tidak hanya membantu memahami pola spasial kemiskinan ekstrem, tetapi juga menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis wilayah (*place-based policy*) yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- c. Menyusun strategi penanganan kemiskinan ekstrem jangka pendek dan panjang
 Tujuan ketiga adalah merumuskan strategi dan arah kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten HSS dengan horizon waktu jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada perbaikan data, validasi lapangan, dan efektivitas penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Sementara itu, strategi jangka menengah–panjang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, penguatan layanan dasar, dan tata kelola program lintas sektor. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menghasilkan analisis deskriptif mengenai kondisi kemiskinan ekstrem, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara keseluruhan, hasil kajian ini diharapkan menjadi acuan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan mempercepat pencapaian tujuan nasional penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat kabupaten.
- d. Menganalisis perbandingan strategi penanggulangan kemiskinan dengan wilayah lain di Indonesia

1.4. Manfaat Kajian

Kajian ini memiliki nilai strategis yang tinggi dalam mendukung arah pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), khususnya dalam konteks pencapaian target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem 0% sebagaimana diamanatkan oleh Strategi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Stranas-PKE). Hasil kajian tidak hanya berfungsi sebagai laporan akademik, tetapi juga sebagai bahan kebijakan operasional yang dapat diimplementasikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten HSS bersama perangkat daerah terkait. Secara umum, manfaat kajian ini dapat dijelaskan dalam tiga aspek utama berikut:

1. Sebagai masukan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten HSS dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Kajian ini memberikan evidence-based policy input bagi Pemerintah Kabupaten HSS dan TKPK dalam merumuskan strategi dan program pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah. Berdasarkan hasil analisis data P3KE 2024, DTKS, serta observasi lapangan, kajian ini menyoroti segmen rumah tangga yang paling rentan dan wilayah prioritas intervensi yang memerlukan perhatian segera. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk menyusun kebijakan targeting bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi mikro, dan perbaikan layanan dasar. Selain itu, hasil kajian juga memperkuat kapasitas TKPK dalam melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta mendorong sinkronisasi program perlindungan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

2. Sebagai bahan sinkronisasi data dengan BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam hal ini Dinas Sosial .

Manfaat kedua adalah menyediakan dasar empiris untuk sinkronisasi dan validasi data kemiskinan ekstrem antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Pemerintah Kabupaten HSS. Saat ini, tiga basis data utama DTKS, P3KE, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) masih memiliki perbedaan format, metodologi, dan frekuensi pembaruan. Kajian ini membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian (data incongruity) dan duplikasi penerima manfaat, serta memberikan rekomendasi teknis untuk membangun sistem integrasi data kemiskinan terpadu di tingkat daerah. Melalui proses sinkronisasi ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan akurasi dan transparansi data

kemiskinan, tetapi juga memperkuat dasar perencanaan program sosial berbasis desil dan *by name by address* (BNBA).

3. Sebagai acuan penyusunan RPJMD dan program lintas sektor

Kajian ini juga berperan sebagai referensi teknokratis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lintas sektor di Kabupaten HSS. Temuan mengenai klaster wilayah kemiskinan ekstrem dan karakteristik sosial-ekonominya dapat diintegrasikan ke dalam rencana aksi daerah penghapusan kemiskinan ekstrem (RAD-PKE), serta menjadi rujukan bagi OPD sektor sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan ekonomi dalam menyusun program yang lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu, rekomendasi strategis dari kajian ini dapat memperkuat sinkronisasi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional, terutama dalam mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs) poin 1* tentang pengentasan kemiskinan dalam segala bentuknya.

Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya menjadi dokumen analitis, tetapi juga alat bantu perencanaan dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan para pemangku kepentingan lainnya. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarlembaga, memperbaiki tata kelola data, dan mempercepat tercapainya pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

1.5. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan analisis yang komprehensif dan akurat. Sumber data utama mencakup:

1. Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Tahun 2024, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/135/KUM/2024, berisi daftar rumah tangga miskin ekstrem *by name by address* (BNBA). Data ini menjadi basis utama untuk analisis kuantitatif dan klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat deprivasi sosial-ekonomi.
2. Data BNBA (*By Name By Address*) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi rumah tangga sasaran kemiskinan ekstrem secara individu dan memastikan sinkronisasi dengan data DTKS dan Regsosek.
3. Temuan lapangan dari hasil survei dan wawancara mendalam di 11 desa, yang dilakukan oleh tim kajian LPPM Universitas Lambung Mangkurat pada periode Agustus–Oktober 2025. Hasil lapangan ini meliputi wawancara dengan kepala

desa, penerima bantuan, dan tokoh masyarakat untuk menggali faktor penyebab kemiskinan, pola ketergantungan terhadap bantuan, dan potensi ekonomi lokal. Dengan kombinasi ketiga sumber ini, analisis dilakukan secara integratif melalui dua pendekatan utama, yaitu Analisis Klaster (*Cluster Analysis*) untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kemiskinan dan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk merumuskan strategi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

1.5.1. Wilayah Kajian dan Fokus Geografis

Secara geografis, wilayah kajian meliputi lima kawasan utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mewakili karakter sosial, ekonomi, dan topografi yang beragam, yaitu:

1. Wilayah 3 Daha (Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat), kawasan dataran rendah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di kabupaten ini, ditandai dengan akses transportasi yang sulit dan ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian tradisional.
2. Kawasan Loksado (wilayah pegunungan), desa-desa seperti Loksado dan Loklahung memiliki tantangan geografis dan akses layanan dasar yang terbatas, sehingga menjadi contoh tipikal kemiskinan berbasis infrastruktur dan deprivasi layanan dasar.
3. Kawasan urban Kandangan, digunakan sebagai pembanding (*control area*) yang merepresentasikan wilayah dengan akses layanan publik lebih baik, namun masih memiliki kantong kemiskinan perkotaan di sekitar area pinggiran kota.

Dalam setiap wilayah tersebut, dipilih 11 desa lokasi penelitian, yaitu Muning Baru, Tambangan, Baruh Jaya, Pakan Dalam, Murung Raya, Pandulangan, Gambah Luar, Karang Jawa, Loksado, Loklahung, dan Jembatan Merah. Lokasi ini mencerminkan keragaman sosial dan ekonomi antara desa berbasis pertanian, peternakan, hingga desa dengan aktivitas ekonomi nonformal dan akses terbatas terhadap layanan dasar.

Melalui ruang lingkup ini, kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai profil kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik dari sisi kuantitatif (jumlah dan persebaran rumah tangga miskin ekstrem) maupun kualitatif (faktor penyebab dan konteks sosial-budaya). Dengan demikian, hasil kajian akan mampu menjadi dasar perumusan strategi kebijakan daerah yang lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan karakteristik wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Definisi Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem pada dasarnya menggambarkan kondisi ketika seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak, baik dari sisi pendapatan maupun dari akses terhadap layanan dasar. Secara internasional, Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan kemiskinan ekstrem berdasarkan garis kemiskinan internasional sebesar USD 2,15 per kapita per hari (Purchasing Power Parity/PPP) tahun 2017, yang merupakan pembaruan dari ambang sebelumnya sebesar USD 1,90 PPP/hari (World Bank Group, 2022). Ambang batas baru ini digunakan untuk menyesuaikan dengan perubahan tingkat harga global dan daya beli masyarakat di negara-negara berkembang. Dengan demikian, individu yang memiliki pengeluaran di bawah USD 2,15 PPP per hari dikategorikan berada dalam kemiskinan ekstrem global.

Definisi ini bukan sekadar mengukur jumlah uang yang dibelanjakan, tetapi menilai apakah seseorang mampu hidup secara bermartabat dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, air bersih, sanitasi, tempat tinggal yang layak, serta layanan pendidikan dan kesehatan minimum (Nations, 2022; World Bank Group, 2022). Oleh karena itu, pendekatan kemiskinan ekstrem modern tidak hanya bersifat moneter, melainkan juga multidimensional, dengan mempertimbangkan dimensi deprivasi sosial dan akses layanan publik.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi konsep Bank Dunia tersebut untuk keperluan pengukuran nasional. BPS mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem nasional, yang ekuivalen dengan sekitar Rp 11.633 per kapita per hari (harga Maret 2023) atau Rp 349.000 per kapita per bulan. Nilai ini disesuaikan setiap tahun dengan inflasi dan paritas daya beli. Namun, BPS juga menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem tidak hanya soal pendapatan, melainkan juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar air minum, sanitasi, perumahan layak, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan. Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas melalui *Laporan SDGs Indonesia 2023* menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem (Target 1.1 SDGs) tidak hanya diukur melalui pengeluaran rumah tangga, melainkan juga melalui indeks kemiskinan multidimensi (Multidimensional Poverty Index/MPI) yang

menggabungkan dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pendekatan ini semakin relevan karena banyak rumah tangga yang “tidak miskin” secara pendapatan, namun masih hidup dalam keterbatasan akses layanan dasar atau perumahan yang tidak layak sebuah kondisi yang dikenal sebagai *non-income poverty*.

Organisasi seperti UNDP (United Nations Development Programme) dan OECD menekankan pentingnya melihat kemiskinan ekstrem secara multidimensi, karena kemiskinan bukan hanya kekurangan uang tetapi kekurangan pilihan hidup (lack of choices). Menurut UNDP, seseorang disebut miskin ekstrem bila mengalami deprivasi serius setidaknya pada sepertiga indikator utama, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Sen (2009) dalam *Development as Freedom*, yang menyebut bahwa kemiskinan adalah “ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang seseorang nilai penting” (*capability deprivation*). Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem tidak bisa berhenti pada pemberian bantuan tunai, tetapi harus memperluas kapabilitas manusia dan akses terhadap kesempatan produktif. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), definisi ini memiliki relevansi yang besar. Berdasarkan data Profil Kemiskinan Kalimantan Selatan 2024 (BPS, 2024), HSS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sekitar 0,6% dari total penduduk, dengan kemiskinan umum sekitar 3,12%. Secara statistik angka ini termasuk rendah dibandingkan kabupaten lain di provinsi tersebut. Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa deprivasi layanan dasar masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama di kawasan 3 Daha (Selatan, Utara, Barat) dan Loksado. Masyarakat di wilayah ini tidak selalu miskin dari segi pengeluaran, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam aspek non-moneter seperti:

1. rumah tidak layak huni,
2. sanitasi terbatas,
3. air bersih sulit dijangkau,
4. jarak jauh ke sekolah dan puskesmas,
5. serta ketergantungan pada bantuan sosial untuk konsumsi harian.

Dengan demikian, pengukuran kemiskinan ekstrem di HSS tidak cukup hanya berbasis pendapatan, melainkan juga perlu mempertimbangkan indikator kualitas hidup. Artinya, rumah tangga yang mungkin secara nominal tidak miskin tetapi tidak memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan sumber penghidupan yang

stabil, tetap perlu dikategorikan dalam kelompok miskin ekstrem secara fungsional (*functionally extreme poor*).

Pendekatan multidimensi ini sejalan dengan panduan Bappenas Tahun 2023 dan Stranas-PKE, yang menekankan pentingnya mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan ekstrem berbasis wilayah (*spatial poverty mapping*) dan mengintegrasikan hasilnya ke dalam kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan dasar. Definisi kemiskinan ekstrem telah berkembang dari sekadar ukuran pendapatan menjadi kerangka multidimensi yang menilai kesejahteraan manusia secara lebih menyeluruh. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penerapan definisi ini membantu pemerintah daerah memahami bahwa angka kemiskinan ekstrem yang rendah tidak selalu berarti bebas dari kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem harus mempertimbangkan dua pendekatan sekaligus:

1. *Moneter* – melalui perbaikan penghasilan dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
2. *Non-moneter* – melalui peningkatan kualitas perumahan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan.

2.2. Teori dan Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan multidimensi. Ia tidak hanya ditentukan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh struktur ekonomi, perilaku sosial, kapasitas individu, serta kebijakan publik yang memengaruhi distribusi sumber daya. Oleh karena itu, analisis kemiskinan tidak cukup melihat sisi ekonomi semata, melainkan perlu memadukan pendekatan struktural, kultural, dan individual.

1. Pendekatan Struktural: Ketimpangan Sistem dan Akses Ekonomi

Menurut (Todaro & Smith, 2020), penyebab utama kemiskinan di negara berkembang sering kali bersifat struktural, yakni berakar pada ketimpangan sistem ekonomi dan pembangunan yang tidak merata antarwilayah. Dalam konteks ini, kemiskinan terjadi bukan karena individu malas atau tidak mau bekerja, tetapi karena struktur kesempatan ekonomi dan distribusi sumber daya tidak berpihak pada kelompok miskin. Faktor-faktor struktural meliputi: keterbatasan akses terhadap tanah, modal, dan pekerjaan produktif, minimnya

infrastruktur publik di wilayah rural, serta kebijakan pembangunan yang lebih banyak menguntungkan pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Bappenas menegaskan bahwa kemiskinan struktural masih terjadi karena ketimpangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah yang bergantung pada pertanian tradisional dengan produktivitas rendah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses jalan, air bersih, pasar, dan sarana pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ravallion (2020) yang menekankan bahwa kemiskinan tidak dapat dihapus hanya melalui bantuan sosial, tetapi memerlukan perubahan struktural ekonomi lokal yakni penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar. Di HSS, kemiskinan struktural terlihat di wilayah 3 Daha dan Loksado, di mana masyarakat masih bergantung pada pertanian subsisten, transportasi terbatas, dan pasar lokal yang kecil. Dengan demikian, kemiskinan struktural menuntut intervensi kebijakan berupa pembangunan infrastruktur dasar, dukungan kewirausahaan, dan kebijakan fiskal daerah yang pro-pedesaan.

2. Pendekatan Kultural: Nilai Sosial, Perilaku, dan Ketergantungan

Selain faktor struktural, faktor kultural juga berperan dalam membentuk pola kemiskinan. Pendekatan ini berangkat dari pandangan Lewis (1966) tentang *culture of poverty*, yang menjelaskan bahwa kemiskinan dapat menjadi bagian dari “gaya hidup” karena norma dan kebiasaan sosial yang diwariskan antar generasi. Dalam penelitian Todaro & Smith (2020) faktor budaya ini tampak dalam bentuk rendahnya aspirasi pendidikan, ketidakberanian mengambil risiko usaha, dan rasa pasrah terhadap kondisi ekonomi. Di Indonesia, UNDP menyebutkan bahwa ketergantungan sosial terhadap bantuan tunai jangka panjang tanpa disertai program pemberdayaan dapat membentuk “kebiasaan bantuan” (*dependency habit*), di mana masyarakat merasa nyaman sebagai penerima, bukan pelaku ekonomi. Temuan lapangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperkuat teori ini, dimana sebagian masyarakat miskin ekstrem di wilayah pedesaan terutama penerima PKH dan BLT menunjukkan ketergantungan psikologis terhadap bantuan sosial, disertai persepsi bahwa bantuan adalah “hak tetap” bukan “bantuan sementara”. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat

menurunkan motivasi kerja dan menunda transisi keluar dari kemiskinan (*graduation*). Oleh karena itu, faktor kultural ini perlu direspon dengan strategi perubahan perilaku dan edukasi sosial, misalnya pelatihan literasi keuangan, pembentukan kelompok usaha mandiri, dan penguatan nilai produktivitas melalui pendekatan komunitas.

3. Pendekatan Individual: Kapasitas, Pendidikan, dan Produktivitas

Faktor individual menyoroti aspek kemampuan dan peluang personal. Menurut Sen (2009) dalam *Development as Freedom*, kemiskinan adalah bentuk “ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai” (*capability deprivation*). Dengan kata lain, seseorang bisa miskin bukan karena kekurangan uang semata, tetapi karena tidak memiliki kapabilitas pendidikan, keterampilan, kesehatan untuk keluar dari kemiskinan. Dalam konteks HSS, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga miskin ekstrem memiliki pendidikan maksimal SD dan tidak memiliki keterampilan usaha produktif. Banyak di antara mereka bekerja sebagai buruh harian, petani subsisten, atau pelaku usaha informal beromzet kecil. Keterbatasan kemampuan literasi finansial dan minimnya kepercayaan diri untuk mengambil pinjaman usaha juga membuat mereka sulit naik kelas secara ekonomi. Rendahnya produktivitas individu merupakan akar kemiskinan jangka panjang di negara berkembang, karena tanpa peningkatan kapasitas manusia (*human capital*), transfer bantuan hanya bersifat sementara. Untuk itu, peningkatan keterampilan kerja, pendidikan anak, dan pendampingan usaha kecil menjadi kunci memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

4. Ketimpangan Distribusi Sumber Daya dan Infrastruktur

Faktor lain yang memperkuat kemiskinan ekstrem adalah ketimpangan distribusi sumber daya dan infrastruktur antarwilayah. Bappenas mencatat bahwa ketimpangan pembangunan antar-daerah menyebabkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap layanan dasar. Wilayah perkotaan menikmati fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pasar tenaga kerja yang lebih baik, sementara daerah perdesaan seperti Loksado atau Daha Selatan di HSS menghadapi biaya logistik tinggi dan terbatasnya infrastruktur publik. UNDP menyebut fenomena ini sebagai *spatial poverty trap* di mana masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil cenderung tetap miskin karena infrastruktur yang terbatas membatasi peluang ekonomi mereka. Dalam konteks HSS, tantangan ini terlihat jelas dalam kondisi

jalan desa, akses transportasi, dan keterbatasan pasar hasil pertanian. Oleh karena itu, program penghapusan kemiskinan ekstrem harus disertai dengan pembangunan wilayah berbasis inklusif agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Dari berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ekstrem tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara struktur ekonomi yang timpang, budaya sosial yang pasif, dan keterbatasan individu dalam mengakses peluang ekonomi. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Selatan, faktor struktural (akses dan infrastruktur) dan kultural (ketergantungan bantuan) menjadi penyumbang dominan, sementara faktor individual memperkuat kerentanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem harus mengombinasikan pendekatan struktural (perbaikan sistem dan infrastruktur), kultural (edukasi dan pemberdayaan), dan individual (peningkatan kapasitas SDM) agar dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

2.3. Kerangka Nasional Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia berada dalam kerangka besar pembangunan nasional yang terintegrasi dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Target global yang diadopsi Indonesia menekankan bahwa kemiskinan ekstrem harus dihapus sepenuhnya pada tahun 2030, dengan target nasional 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membentuk Strategi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Stranas-PKE), yang berfungsi sebagai pedoman koordinatif lintas kementerian/lembaga dan daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis data, lokasi, dan rumah tangga (*by name by address*).

1. Strategi Nasional Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Stranas-PKE)

Stranas-PKE merupakan instrumen utama pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Strategi ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Desa

PDTT, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Daerah. Stranas-PKE menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem tidak dapat diatasi hanya dengan peningkatan pendapatan, tetapi harus melalui pendekatan multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan layanan dasar. Oleh karena itu, kebijakan ini berfokus pada tiga pilar utama.

Pilar 1 – Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Ekstrem (Perlindungan Sosial)

Pilar pertama bertujuan memastikan rumah tangga miskin ekstrem memiliki jaminan konsumsi dasar dan terlindungi dari risiko sosial-ekonomi. Program yang termasuk dalam pilar ini antara lain:

- a. Program Keluarga Harapan (PKH),
- b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
- c. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,
- d. serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Fokus utama pilar ini adalah menjamin tidak ada rumah tangga miskin ekstrem yang terlewat dalam sistem bantuan sosial nasional, sesuai prinsip *leaving no one behind*.

Pilar 2 – Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan Ekonomi

Pilar kedua berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin ekstrem agar dapat bertransisi menuju kemandirian ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan berbasis potensi lokal melalui:

- a. pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan,
- b. akses permodalan (KUR Super Mikro, pembiayaan ultra mikro, dana BUMDes),
- c. pengembangan kegiatan produktif di sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri kecil.

Pilar ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari *charity-based* menuju *capacity-based approach*, di mana rumah tangga miskin ekstrem tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku dalam peningkatan kesejahteraan.

Pilar 3 – Pengurangan Kantong Kemiskinan melalui Peningkatan Layanan Dasar dan Infrastruktur

Pilar ketiga diarahkan pada penanganan dimensi non-moneter kemiskinan, yaitu peningkatan akses terhadap layanan dasar. Program utama yang diintegrasikan meliputi:

- a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),
- b. PAMSIMAS untuk air bersih,
- c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),
- d. Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Pintar.

Fokusnya adalah memastikan setiap warga miskin ekstrem memiliki rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi memadai, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan. Tanpa pemenuhan dimensi ini, rumah tangga tetap berada dalam lingkaran kemiskinan ekstrem meskipun pendapatan meningkat.

2. Sinergi Program Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, dan Layanan Dasar

Stranas-PKE menekankan prinsip sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem bergantung pada keterpaduan antara tiga domain kebijakan: perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan layanan dasar.

a. Sinergi Perlindungan Sosial

Integrasi data menjadi fondasi utama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial yang efektif. Pemerintah menggunakan tiga basis data utama:

1. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kementerian Sosial,
2. P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, dan
3. Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang dikembangkan oleh BPS.

Sinergi ketiganya menciptakan sistem satu data kemiskinan nasional yang memungkinkan kebijakan lebih akurat (*data-driven policy*). Dalam praktiknya, pemerintah daerah berperan penting melakukan verifikasi dan validasi lapangan untuk menghindari kesalahan sasaran.

b. Sinergi Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain:

- 1) Kementerian Koperasi dan UKM (program KUR mikro dan pembiayaan UMKM),
- 2) Kementerian Pertanian (bantuan sarana produksi pertanian dan peternakan),
- 3) Kementerian Desa PDTT (penguatan BUMDes, dana desa produktif),
- 4) serta Kementerian Tenaga Kerja (pelatihan vokasi dan padat karya).

Stranas-PKE mengarahkan agar pemberdayaan ekonomi berbasis pada klaster rumah tangga miskin ekstrem dan potensi wilayah, bukan sekadar persebaran bantuan secara umum.

c. Sinergi Layanan Dasar

Layanan dasar menjadi kunci keberlanjutan kesejahteraan. Pemerintah melalui Bappenas (2022) mengintegrasikan indikator layanan dasar ke dalam *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (RAN-PKE)*, mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan. Program infrastruktur sosial seperti PAMSIMAS, BSPS, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat menjadi instrumen untuk mengurangi *non-income poverty*. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pendekatan ini relevan karena kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan layanan dasar ketimbang pendapatan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan layanan dasar dan program sosial menjadi prioritas intervensi lokal.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Stranas-PKE

Stranas-PKE menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama (local implementing agency) dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah kabupaten/kota wajib:

- 1) Mengintegrasikan target penghapusan kemiskinan ekstrem ke dalam RPJMD dan RKPD.
- 2) Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai turunan dari RAN-PKE nasional.
- 3) Memperkuat TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) untuk mempercepat koordinasi lintas OPD dan pendataan lapangan.

- 4) Melakukan pemutakhiran data dan pemetaan spasial kemiskinan ekstrem berbasis desa.

Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), langkah-langkah ini telah dilakukan melalui kajian berbasis SWOT dan analisis klaster, yang mengidentifikasi karakteristik kemiskinan ekstrem per wilayah (3 Daha, Loksado, Kandangan). Pendekatan ini sesuai dengan semangat *place-based policy* yang dianjurkan oleh Stranas-PKE dan Bappenas (2023), agar strategi daerah bersifat kontekstual, berbasis data, dan berkelanjutan.

Kerangka nasional penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial. Melalui Stranas-PKE, pemerintah mengintegrasikan tiga dimensi utama—perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar—dalam satu kerangka kebijakan nasional yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pusat dan daerah. Dengan dukungan sistem data terpadu (DTKS–P3KE–Regsosek) dan penguatan peran pemerintah daerah, strategi ini diharapkan mampu menciptakan penghapusan kemiskinan ekstrem yang berkeadilan, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen global pada SDGs 2030.

2.4. Pendekatan Analitis: SWOT dan *Clustering*

Dalam kajian strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, digunakan dua pendekatan analitis utama, yaitu analisis SWOT dan analisis klaster (*Clustering*). Kedua metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, serta mendukung formulasi kebijakan berbasis data dan konteks wilayah (*place-based policy*). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah memahami karakter kemiskinan ekstrem tidak hanya dari angka, tetapi juga dari konteks sosial, kelembagaan, dan peluang ekonomi lokal.

1. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT merupakan metode perumusan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan suatu program atau kebijakan. Menurut Helms & Nixon, 2010a)

analisis SWOT membantu organisasi publik dan pemerintah dalam menyusun strategi yang realistis dengan mengenali empat dimensi utama:

- a. Strengths (Kekuatan): faktor internal positif yang dapat mendukung keberhasilan program.
- b. Weaknesses (Kelemahan): faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program.
- c. Opportunities (Peluang): kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencapaian tujuan.
- d. Threats (Ancaman): kondisi eksternal yang berpotensi menghambat keberlanjutan program.

Dalam konteks kebijakan publik, analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal melalui empat kuadran strategi, yaitu:

1. Strategi SO (Strength–Opportunity): memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi WO (Weakness–Opportunity): memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi ST (Strength–Threat): menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
4. Strategi WT (Weakness–Threat): meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman.

Menurut (Strecker et al., (2014) penggunaan SWOT dalam kebijakan sosial memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas program dari sisi internal (kapasitas lembaga, data, sumber daya) dan eksternal (dukungan program nasional, kondisi sosial, dinamika ekonomi).

Dalam kajian kemiskinan ekstrem di Kabupaten HSS, analisis SWOT digunakan untuk:

- a. mengidentifikasi kekuatan sosial dan modal masyarakat (seperti daya juang dan solidaritas sosial),
- b. memahami kelemahan sistemik, misalnya ketergantungan terhadap bantuan dan lemahnya tata kelola data,
- c. memetakan peluang penguatan ekonomi lokal (seperti potensi peternakan, UMKM, dan pertanian),

- d. serta mengantisipasi ancaman eksternal, seperti ketimpangan akses layanan dasar dan risiko stagnasi kesejahteraan.

Dengan pendekatan ini, hasil SWOT dapat diterjemahkan menjadi strategi daerah yang konkret, misalnya:

- a. *Strategi SO*: memperkuat potensi peternakan dan perdagangan lokal melalui akses pembiayaan mikro (KUR).
- b. *Strategi WO*: memperbaiki tata kelola bantuan sosial melalui integrasi data DTKS–P3KE–Regsosek.
- c. *Strategi ST*: memanfaatkan kekuatan jaringan sosial untuk menghadapi ancaman inflasi pangan.
- d. *Strategi WT*: mengurangi ketergantungan pada bantuan melalui program graduation dan pendampingan keluarga produktif.

Analisis SWOT menjadi dasar formulasi kebijakan daerah dalam **Bab V** laporan kajian, di mana strategi lintas pilar (perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, layanan dasar) disusun berdasarkan hasil kombinasi empat kuadran tersebut.

2. Analisis Klaster (*Clustering Analysis*)

Selain analisis SWOT, kajian ini juga menggunakan analisis klaster untuk mengelompokkan wilayah atau rumah tangga berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi kemiskinan ekstrem. Analisis klaster merupakan metode statistik multivariat yang bertujuan untuk mengelompokkan objek ke dalam beberapa kelompok (*Clusters*) yang homogen secara internal dan heterogen antar kelompok ((Everitt et al., 2011a)

a. Prinsip Dasar Metode Klaster

Metode ini bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kesamaan atribut, seperti pendapatan, kondisi rumah, akses terhadap layanan dasar, dan jenis pekerjaan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah K-Means *Clustering*, yang dikembangkan oleh (MacQueen, 1965). Dalam metode ini, algoritma secara iteratif mengelompokkan objek (rumah tangga atau desa) ke dalam klaster dengan minimasi jarak rata-rata (Euclidean Distance) terhadap titik pusat klaster (centroid). Langkah-langkah analisis K-Means dalam kajian ini meliputi:

1. Menentukan jumlah klaster (k) berdasarkan distribusi data sosial-ekonomi rumah tangga miskin ekstrem.

2. Menghitung jarak (Euclidean distance) setiap objek terhadap titik pusat klaster.
3. Mengelompokkan objek ke dalam klaster dengan jarak terdekat.
4. Memperbarui posisi titik pusat klaster hingga hasil pengelompokan stabil.
5. Menginterpretasikan setiap klaster berdasarkan variabel dominan.

Hasil dari proses ini menghasilkan tiga klaster kemiskinan ekstrem di HSS, yaitu:

1. Klaster 1 – Deprivasi Layanan Dasar:

Rumah tangga dengan kondisi fisik rumah tidak layak, sanitasi buruk, dan keterbatasan akses air bersih serta pendidikan dasar.

2. Klaster 2 – Pekerja Informal Berbasis Potensi Lokal:

Rumah tangga dengan pendapatan rendah namun memiliki potensi ekonomi lokal, seperti peternakan kecil, pertanian, atau usaha mikro.

3. Klaster 3 – Rumah Tangga Stabil tapi Rentan (Ketergantungan Bantuan):

Rumah tangga dengan akses layanan dasar cukup baik, namun masih bergantung pada bantuan sosial untuk mempertahankan konsumsi.

b. Relevansi Analisis Klaster dalam Kebijakan Publik

Menurut (Sarstedt & Mooi, 2019) analisis klaster membantu pembuat kebijakan membedakan strategi intervensi berdasarkan kebutuhan dan kondisi kelompok sasaran. Dalam konteks kemiskinan ekstrem, pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang lebih presisi (targeted policy) karena tidak semua rumah tangga miskin ekstrem memiliki akar masalah yang sama.

Hasil pengelompokan klaster di HSS kemudian digunakan untuk:

1. menentukan wilayah prioritas intervensi (desa atau kecamatan),
2. menyusun strategi diferensiasi kebijakan per klaster,
3. serta mengintegrasikan hasil klaster dengan analisis SWOT untuk menyusun strategi intervensi lintas sektor (lihat Bab V laporan).

Sebagai contoh:

1. Klaster 1 (Deprivasi Layanan Dasar) diarahkan pada program infrastruktur sosial dan sanitasi.
2. Klaster 2 (Pekerja Informal) difokuskan pada pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan akses modal usaha mikro.

3. Klaster 3 (Rumah Tangga Rentan) difokuskan pada strategi graduation dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Dengan menggabungkan hasil analisis klaster dan SWOT, kajian ini mampu menyajikan peta strategi kemiskinan ekstrem yang kontekstual, menggabungkan pendekatan statistik dengan pemahaman sosial lapangan.

3. Integrasi SWOT–*Clustering* sebagai Basis Formulasi Strategi

Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan kerangka analisis yang komprehensif, di mana hasil klaster digunakan untuk menentukan profil wilayah dan kelompok rumah tangga, sementara analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan yang sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada setiap klaster. Kerangka integratif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Alur Analisis dan Metode Pengolahan Data Kajian Kemiskinan Ekstrem

No.	Tahap Analisis	Tujuan	Metode	Output
1.	Identifikasi Data Kemiskinan (P3KE, BNBA, Lapangan)	Menentukan variabel sosial-ekonomi utama	Statistik deskriptif & validasi lapangan	Basis Data Terpadu HSS
2.	Analisis Klaster	Mengelompokkan rumah tangga/desa berdasarkan karakteristik kemiskinan	K-Means <i>Clustering</i>	Profil Klaster 1–3
3.	Analisis SWOT	Menilai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman per klaster	Matriks SWOT (Helms & Nixon, 2010)	Strategi SO, WO, ST, WT
4.	Formulasi Strategi Daerah	Merancang arah kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem	Integrasi SWOT– <i>Cluster</i>	Rekomendasi kebijakan per klaster & sektor

Melalui pendekatan ini, hasil kajian tidak hanya deskriptif, tetapi juga operasional dan implementatif, karena setiap klaster memiliki rekomendasi strategi spesifik yang dapat

langsung diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan RPJMD Kabupaten HSS.

BAB III

METODE KAJIAN

Kajian ini memakai pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan desain sekuensial eksplanatori. Pada tahap awal, data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis untuk memberi gambaran dasar mengenai kondisi rumah tangga miskin ekstrem. Temuan awal ini kemudian diperdalam melalui pengumpulan data kualitatif agar konteks, pengalaman, dan faktor sosial yang tidak tertangkap oleh angka dapat dipahami secara lebih utuh. Pendekatan seperti ini yang menggabungkan kekuatan analisis kuantitatif dan kualitatif dalam satu rangkaian kerja merujuk pada panduan (Creswell & Poth, 2024) yang menekankan pentingnya kombinasi metode saat meneliti isu kompleks seperti kemiskinan ekstrem. Model campuran ini juga sejalan dengan kerangka analisis yang digunakan dalam kajian kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memadukan survei kuantitatif dengan wawancara mendalam untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi dan dinamika kerentanan masyarakat.

3.1. Design Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif–komparatif dan menggunakan pendekatan *mixed methods*. Pendekatan ini memungkinkan kajian dilakukan dari dua sisi: melalui pengukuran kuantitatif untuk menggambarkan kondisi kemiskinan ekstrem secara objektif, serta melalui data kualitatif untuk menangkap pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang dialami rumah tangga miskin. Selain itu, desain ini dipakai untuk melihat bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan di satu daerah dapat dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Penggunaan metode campuran sejalan dengan pandangan Johnson & Onwuegbuzie, (2004) yang menyatakan bahwa penggabungan data numerik dan naratif membantu meningkatkan validitas temuan sekaligus memperkaya pemahaman terhadap konteks sosial yang kompleks.

3.2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk membangun gambaran menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan ekstrem.

3.2.1. Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan dan digunakan untuk memahami kondisi aktual rumah tangga miskin ekstrem. Pengumpulan dilakukan melalui:

1. Survei rumah tangga miskin, yang mengacu pada daftar penerima dari BPS dan DTKS agar responden sesuai dengan kategori kemiskinan ekstrem.
2. Wawancara mendalam dengan aparatur desa, pelaksana program, dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan penyebab kemiskinan, bentuk kerentanan, serta efektivitas program yang berjalan.
3. Observasi lapangan, terutama di wilayah 3D (Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat), untuk melihat langsung kondisi fisik rumah, akses layanan dasar, dan situasi sosial ekonomi masyarakat.

Ketiga teknik ini memberi gambaran empirik yang lebih dalam dan membantu membaca realitas lapangan secara akurat.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk memperkuat serta memvalidasi temuan primer. Sumber utama meliputi:

1. Statistik kemiskinan dari BPS, termasuk Profil Kemiskinan Kalimantan Selatan, sebagai rujukan indikator makro.
2. Dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah, untuk menelaah arah kebijakan dan prioritas pemerintah.
3. Data P3KE dan DTKS, yang menjadi dasar pensasaran rumah tangga miskin ekstrem.
4. Laporan program bantuan sosial dan pemberdayaan, sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan program.

Kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan analisis yang lebih lengkap, baik dari sisi kebijakan maupun kondisi faktual masyarakat.

3.3. Penentuan Sampel dan Lokasi

3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan pada desa-desa yang teridentifikasi sebagai kantong kemiskinan ekstrem sebagaimana tercantum pada temuan lapangan. Desa-

desa ini dipilih karena menunjukkan tingkat kerentanan tinggi, keterbatasan akses layanan dasar, serta variasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Adapun desa yang menjadi locus penelitian meliputi:

1. Pakan Dalam
2. Muning Baru
3. Murung Raya
4. Pandulangan
5. Baruh Jaya
6. Tambangan
7. Loksado
8. Gambah Luar
9. Karang Jawa
10. Jembatan Merah
11. Lok Lahung

Untuk memperkuat analisis antarwilayah, desa-desa tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam lima klaster lokasi, yaitu:

1. Daha Selatan: Muning Baru, Tambangan, Baruh Jaya
2. Daha Utara: Pakapuran Kecil, Pakan Dalam, Murung Raya
3. Padang Batung/Angkinang: Pandulangan, Kayu Abang
4. Kandangan: Gambah Luar, Karang Jawa (wilayah urban)
5. Loksado: Desa Loksado dan Loklahung (wilayah pegunungan)

Kombinasi desa ini memberikan gambaran representatif tiga tipe bentang sosial geografis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu kawasan perkotaan, pegunungan, dan wilayah sungai (tiga Daha).

3.3.2. Dasar Penentuan Sampel

Sampel rumah tangga ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan ini dilakukan karena penelitian memerlukan informasi mendalam dari kelompok sasaran yang benar-benar berada dalam kondisi miskin ekstrem. Kriteria penentuan sampel meliputi:

1. Terdaftar dalam kategori miskin ekstrem berdasarkan basis data resmi seperti BPS dan DTKS.

2. Berdomisili di desa prioritas, yakni desa yang termasuk dalam klaster wilayah kemiskinan ekstrem di HSS.
3. Mewakili variasi karakteristik kerentanan, khususnya untuk kebutuhan analisis *Cluster* seperti kondisi rumah, akses layanan dasar, pendidikan, pekerjaan, dan ketergantungan bantuan (Everitt et al., 2011b).
4. Merepresentasikan tiga tipe wilayah, yaitu urban, pegunungan, dan wilayah yang berada di sepanjang aliran sungai.

Pendekatan purposive ini lazim digunakan dalam penelitian kemiskinan yang menekankan kedalaman konteks sosial dan pengalaman rumah tangga (Miles et al., 2014)

3.3.3. Jumlah Sampel

Jumlah responden bervariasi pada setiap desa, mulai dari 1 hingga 8 rumah tangga. Total keseluruhan responden yang diwawancarai adalah 48 rumah tangga, sesuai tabel distribusi sampel berikut:

Tabel 2. Jumlah Responden Perdesa

No.	Nama Desa	Jumlah Responden
1.	Pakan Dalam	8
2.	Muning Baru	7
3.	Murung Raya	7
4.	Pandulangan	6
5.	Baruh Jaya	5
6.	Tambangan	6
7.	Loksado	3
8.	Gambah Luar	2
9.	Karang Jawa	2
10.	Jembatan Merah	1
11.	Lok Lahung	1

Variasi jumlah responden antar desa mencerminkan perbedaan ukuran populasi miskin ekstrem dan kondisi geografis masing-masing wilayah. Secara metodologis, jumlah total 48 rumah tangga dianggap memadai dan telah memenuhi prinsip data

saturation, yakni kondisi ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan konsisten (Guest *et al.*, 2013)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat teknik utama yang saling melengkapi. Setiap teknik memberikan jenis informasi yang berbeda sehingga gambaran mengenai kondisi rumah tangga miskin ekstrem dapat diperoleh secara lebih utuh.

1. Survei Kuantitatif

Survei dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data numerik mengenai kondisi sosio-ekonomi rumah tangga. Beberapa indikator yang diukur meliputi:

- a. pengeluaran per kapita,
- b. kondisi fisik rumah,
- c. akses terhadap listrik dan air bersih,
- d. tingkat pendidikan kepala keluarga,
- e. tingkat ketergantungan pada bantuan sosial.

Indikator tersebut sejalan dengan variabel yang digunakan dalam analisis *Cluster*, sehingga memungkinkan pengelompokan rumah tangga berdasarkan karakteristik kerentanannya.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan kepala keluarga, aparat desa, serta tokoh masyarakat untuk menggali aspek-aspek yang tidak tercapture oleh data numerik. Informasi yang ditelusuri mencakup:

- a. strategi rumah tangga dalam bertahan hidup,
- b. persepsi terhadap bantuan atau program pemerintah,
- c. hambatan struktural seperti akses layanan dasar, pekerjaan, atau kondisi geografis.

Temuan dari wawancara ini juga memperkaya pemahaman seperti tergambar dalam hasil lapangan pada bagian temuan per desa.

3. Focus Group Discussion (FGD)

FGD diselenggarakan di beberapa desa untuk memvalidasi temuan survei dan wawancara, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat. Diskusi kelompok ini membantu:

- a. memeriksa konsistensi data antarresponden,
- b. mengkonfirmasi kebutuhan prioritas per desa,
- c. memahami dinamika sosial lokal yang mempengaruhi kondisi kemiskinan.

FGD juga menegaskan pola kebutuhan antar desa sebagaimana tercermin pada temuan lapangan.

4. Observasi Lapangan

Observasi langsung dilakukan untuk mencatat kondisi nyata di lingkungan tempat tinggal responden, termasuk:

- a. kondisi fisik rumah,
- b. kelayakan hunian,
- c. sanitasi dan kebersihan lingkungan,
- d. akses jalan dan transportasi menuju desa.

Hasil observasi, termasuk dokumentasi foto dan catatan lapangan yang menjadi bukti penting untuk memverifikasi akurasi data primer.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang kemudian digabungkan dalam tahap integrasi. Pendekatan ini memungkinkan temuan numerik dan naratif saling menguatkan sehingga gambaran mengenai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lebih lengkap.

3.5.1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk membaca pola kerentanan rumah tangga miskin ekstrem secara terukur. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan data, seperti tingkat pengeluaran per kapita, kondisi fisik rumah, tingkat pendidikan, serta akses layanan dasar. Langkah ini mengikuti kerangka analisis kuantitatif yang telah disusun dalam kajian.

2. Cluster Analysis (*K-Means* dan *Hierarchical Cluster*)

Analisis *Cluster* digunakan untuk mengelompokkan rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan kesamaan karakteristik. Metode ini memungkinkan identifikasi kelompok dengan tingkat kerentanan serupa, sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran (Everitt et al., 2011b; Kaufman & Rousseeuw, 2005)

3. Analisis Komparatif

Hasil temuan kuantitatif dari HSS dibandingkan dengan daerah benchmark untuk melihat praktik penanggulangan kemiskinan yang terbukti efektif. Perbandingan ini menggunakan data referensi pada bagian benchmark agar interpretasi lebih kontekstual.

3.5.2. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan untuk menangkap dinamika sosial, pengalaman rumah tangga, serta persepsi masyarakat terhadap intervensi pemerintah.

1. *Thematic Analysis*

Teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) digunakan untuk mengorganisir dan menafsirkan data wawancara. Tema yang dihasilkan mencerminkan isu-isu utama dalam kemiskinan ekstrem, antara lain:

- a. strategi bertahan hidup,
- b. kebutuhan layanan dasar,
- c. potensi ekonomi lokal,
- d. persepsi terhadap bantuan pemerintah.

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program yang telah berjalan (Emet & Merba, 2017; Helms & Nixon, 2010b).

3.5.3. Integrasi Kuantitatif dan Kualitatif

Tahap integrasi dilakukan dengan pendekatan **triangulation convergence** (Cresswell, 1994, 1998) Melalui pendekatan ini:

- a. hasil analisis *Cluster* dipadukan dengan temuan kualitatif lapangan
- b. pola kerentanan yang muncul dari data numerik dibandingkan dengan pengalaman dan konteks sosial yang terungkap dalam wawancara dan observasi,

- c. setiap kelompok atau *Cluster* kemudian diberi rekomendasi intervensi yang sesuai dengan karakteristik empirisnya.

Integrasi kedua jenis data ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat desa.

3.6. Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjaga ketelitian dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan beberapa prosedur validitas dan reliabilitas yang umum digunakan dalam penelitian campuran.

1. *Member checking*

Setelah wawancara direkam dan ditranskrip, hasil atau ringkasannya dikonfirmasi kembali kepada informan. Langkah ini memastikan bahwa informasi yang dicatat peneliti benar-benar sesuai dengan pengalaman dan maksud responden, serta meminimalkan risiko salah tafsir.

2. *Audit trail*

Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis melalui catatan lapangan, foto, dan rekaman wawancara. Dokumentasi ini membentuk jejak audit yang memungkinkan penelusuran ulang terhadap proses pengumpulan dan interpretasi data, sehingga meningkatkan transparansi penelitian.

3. *Consistency checking*

Data kuantitatif diperiksa kembali untuk memastikan konsistensi, termasuk melakukan pengecekan outlier sebelum data dimasukkan ke dalam analisis *Cluster*. Langkah ini penting agar hasil pengelompokan tidak bias oleh nilai ekstrem yang tidak mencerminkan kondisi umum responden.

Melalui ketiga mekanisme ini, kualitas data baik dari sisi akurasi maupun keterandalan dapat terjaga, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.7. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika agar seluruh proses pengumpulan data berlangsung dengan menghormati hak dan kenyamanan responden.

1. *Informed consent*

Sebelum wawancara atau survei dilakukan, setiap rumah tangga miskin ekstrem diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, bentuk partisipasi yang diharapkan, dan hak untuk menolak atau menghentikan keterlibatan kapan saja. Persetujuan mereka diperoleh secara sukarela.

2. Kerahasiaan identitas

Identitas responden dijaga sepenuhnya dengan tidak mencantumkan nama, alamat lengkap, atau informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi individu. Data disajikan dalam bentuk agregat dan hanya digunakan untuk kepentingan analisis penelitian.

3. Kenyamanan dan keamanan responden

Proses wawancara dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan responden, termasuk pemilihan waktu dan tempat yang sesuai, serta memastikan bahwa tidak ada tekanan selama proses berlangsung. Peneliti juga memastikan bahwa interaksi berlangsung dengan penuh penghormatan terhadap kondisi sosial dan budaya setempat.

Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya menghasilkan data yang berkualitas, tetapi juga menjaga martabat serta hak-hak masyarakat yang terlibat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

4.1. Kondisi Wilayah dan Demografi

4.1.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibu kota Kandangan. Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat 2°29'59" – 2°56'10" Lintang Selatan dan 114°51'19" – 115°36'19" Bujur Timur. Letak tersebut menempatkan Kabupaten HSS di bagian tengah-selatan provinsi, berfungsi sebagai penghubung antara kawasan dataran rendah bagian utara dengan pegunungan Meratus di selatan.

Secara administratif, luas wilayah Kabupaten HSS mencapai 1.804,94 km² dengan jumlah penduduk sekitar 232.857 jiwa (2020) dan kepadatan rata-rata 130 jiwa/km². Kabupaten ini terdiri atas 11 kecamatan, 4 kelurahan, dan 144 desa. Pemerintahan daerah dipimpin oleh Bupati Syafrudin Noor dan Wakil Bupati Suriani. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Sebelah Timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar
4. Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin

Batas-batas tersebut memperlihatkan bahwa HSS memiliki posisi strategis di jantung Kalimantan Selatan, terutama sebagai koridor penghubung sistem Daerah Aliran Sungai (Barito dan Amandit) yang berperan penting bagi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas 11 kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Sungai Raya
2. Kecamatan Padang Batung
3. Kecamatan Angkinang
4. Kecamatan Telaga Langsat
5. Kecamatan Simpur
6. Kecamatan Kandangan
7. Kecamatan Kalumpang
8. Kecamatan Daha Selatan

9. Kecamatan Daha Utara

10. Kecamatan Daha Barat

11. Kecamatan Loksado

Dari keseluruhan kecamatan tersebut, wilayah Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat secara geomorfologis merupakan dataran rendah alluvial yang sebagian besar berupa lahan rawa dan persawahan tahunan, berperan sebagai lumbung padi rawa bagi Kabupaten HSS. Sementara itu, Kecamatan Loksado berada di sisi tenggara, di wilayah perbukitan Meratus, beriklim sejuk dan memiliki topografi bergelombang hingga curam.

Bagian wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pembahasan di atas adalah kawasan tiga Daha (Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat) serta Kecamatan Loksado. Ketiga kecamatan Daha pada dasarnya berada di hamparan dataran rendah alluvial yang dilalui oleh Sungai Negara dan Sungai Amandit, dengan ketinggian hanya sekitar $\pm 10\text{--}20$ meter dpl. Kondisi hidrologi seperti ini membuat wilayah tersebut kerap mengalami genangan musiman akibat pasang surut dan limpasan sungai, namun pada saat yang sama menghasilkan tanah yang subur untuk usaha pertanian padi rawa, palawija, dan perikanan darat. Pola permukiman penduduk di kawasan ini umumnya mengikuti alur sungai (linear), dan di beberapa desa seperti Muning Dalam, Bajayau, dan Paramaian, transportasi air masih menjadi sarana penting. Secara sosial-ekonomi, masyarakat di wilayah tiga Daha sangat bergantung pada pertanian tradisional dan usaha kecil berbasis rumah tangga.

Berbeda dengan karakter dataran rendah di kawasan Daha, Kecamatan Loksado berada di kaki dan lereng Pegunungan Meratus bagian barat daya, dengan ketinggian yang jauh lebih bervariasi, yakni sekitar 200 hingga 1.000 meter dpl. Wilayah ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air utama bagi Sungai Amandit dan masih memiliki tutupan hutan serta vegetasi pegunungan yang relatif terjaga. Loksado juga dikenal sebagai pusat wisata alam dan budaya, antara lain melalui atraksi *bamboo rafting*, air terjun Haratai, serta keberadaan komunitas Dayak Meratus yang masih mempertahankan tradisi lokal. Secara administratif Loksado terdiri atas 11 desa, di antaranya Halunuk, Haratai, Lumpangi, dan Kamawakan. Kondisi topografi yang curam memang membuat pembangunan infrastruktur lebih menantang, tetapi justru memberi peluang pengembangan kawasan ini ke arah konservasi air, agroforestry, dan ekowisata berkelanjutan.

4.1.2. Luas Wilayah dan Topografi

Secara keseluruhan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sekitar 1 804,94 km², dengan konfigurasi bentang alam yang memperlihatkan perbedaan mencolok antara bagian selatan-barat yang berupa dataran rendah berawa dan bagian timur-selatan yang mulai menanjak ke arah Pegunungan Meratus. Keanekaragaman bentuk lahan inilah yang menyebabkan kondisi topografi, iklim mikro, serta penggunaan lahan di tiap kecamatan memiliki karakter yang berbeda-beda.

Dari arah barat laut ke tenggara, bentang alam HSS terbagi atas dua zona utama. Pertama, zona dataran rendah alluvial dan rawa yang meliputi kawasan Daha Utara, Daha Barat, Daha Selatan, Simpur, Angkinang, dan Sungai Raya. Ketinggian rata-ratanya hanya berkisar antara 10–25 meter di atas permukaan laut, dengan morfologi tanah liat-lempung dan sistem hidrologi yang sangat dipengaruhi oleh Sungai Amandit dan Sungai Negara. Dataran ini sering mengalami genangan musiman, namun kesuburan tanahnya tinggi sehingga mendukung dominasi lahan pertanian dan perikanan darat. Pola penggunaan lahan di kawasan ini sebagian besar berupa sawah ($\pm 47\,136$ ha atau 33,17 %), rawa ($\pm 46\,941$ ha / 33,03 %), serta perkebunan karet dan kebun campuran ($\pm 15\,000$ ha).

Zona kedua adalah wilayah perbukitan dan pegunungan Meratus yang meliputi Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsat, Kalumpang, Kandangan bagian timur, dan Loksado. Daerah ini memiliki ketinggian bervariasi antara 200 hingga 1 000 meter dpl, dengan kontur bergelombang hingga curam. Lereng-lereng di Loksado dan Padang Batung membentuk daerah tangkapan air penting bagi Sungai Amandit. Secara geologi, wilayah ini didominasi Formasi Beraí dan Aluvium Muda, dengan tutupan hutan tropis dan vegetasi pegunungan yang masih relatif baik. Kondisi topografi yang menantang menjadikan sebagian besar lahan digunakan untuk hutan lindung, perkebunan, dan potensi ekowisata, bukan untuk pertanian intensif.

Kontras bentang alam antara dataran rendah rawa di kawasan Daha dan perbukitan Meratus di Loksado memberikan keunikan ekologis bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di satu sisi, dataran basah Daha berfungsi sebagai lumbung pangan dan sumber penghidupan utama masyarakat pertanian, sementara di sisi lain, kawasan perbukitan Loksado berperan penting sebagai “menara air” alami serta kawasan wisata alam dan konservasi.

4.1.3. Iklim dan Hidrologi

Secara klimatologis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berada dalam wilayah beriklim tropis basah dengan pola hujan yang dipengaruhi angin monsun dan kedekatannya dengan jajaran Pegunungan Meratus. Data lama pemerintah daerah mencatat bahwa curah hujan tahunan pernah mencapai sekitar 2.124 mm/tahun dengan udara terasa agak lembap dan sejuk, terutama di kawasan yang lebih tinggi di bagian selatan-timur kabupaten. Data yang lebih baru yang dirujuk BPS dan laporan sektoral menunjukkan bahwa distribusi hujan antarkecamatan tidak seragam: misalnya pada 2021 Kecamatan Simpur tercatat sebagai salah satu yang memiliki rata-rata curah hujan tertinggi di kabupaten ini, dan bulan Maret biasanya menjadi puncak musim hujan. Informasi prakiraan iklim BMKG melalui Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan juga mengonfirmasi bahwa wilayah HSS umumnya berada pada kategori hujan menengah - tinggi sepanjang tahun dengan variasi musiman pada periode hujan utama (sekitar Desember - Maret) dan kemarau pendek di pertengahan tahun.

Suhu udara harian di kawasan dataran rendah (tiga Daha, Kandangan, Sungai Raya) cenderung berada pada kisaran tropis normal $\pm 26-28^{\circ}\text{C}$, dengan kelembapan relatif tinggi. Sementara itu, kawasan yang lebih tinggi seperti Loksado, Telaga Langsat, dan sebagian Padang Batung mendapatkan efek pendinginan orografis dari Meratus sehingga terasa lebih sejuk dan cocok sebagai daerah tangkapan air. Perbedaan ketinggian inilah yang membuat pola hujan di HSS cukup dipengaruhi oleh topografi: lereng-lereng yang menghadap ke Meratus cenderung menerima hujan lebih banyak dibanding dataran rawa di hilir.

Dari sisi hidrologi, HSS termasuk dalam sistem sungai besar di Kalimantan Selatan. Sungai Amandit adalah tulang punggung hidrologi kabupaten: sungai ini berhulu di Pegunungan Meratus (area Loksado dan sekitarnya) lalu mengalir ke arah barat, bercabang, dan akhirnya bermuara ke Sungai Negara yang kemudian menjadi bagian dari sistem DAS Barito. Kajian hidrologi di sub-sub DAS Amandit menunjukkan bahwa hampir seluruh anak sungai di kawasan hulu (termasuk sungai-sungai kecil di Loksado seperti Sungai Ahan) pada akhirnya dibawa oleh Sungai Amandit ke Sungai Negara, sehingga kawasan hulu ini berperan sangat penting sebagai daerah tangkapan air dan pengendali sedimen. Karena hulu sungai berada di lereng curam dan banyak mengalami pembukaan lahan, pengelolaan konservasi tanah dan air di

zona ini sangat menentukan kejernihan air dan frekuensi banjir/banjir rawa di zona hilir (Daha dan wilayah rawa).

4.1.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tercatat 232.857 jiwa pada luas wilayah sekitar 1.804,94 km². Untuk periode mutakhir, publikasi BPS Provinsi Kalimantan Selatan mencatat estimasi jumlah penduduk HSS tahun 2023 mencapai sekitar 236.328 jiwa, dan menurut rangkuman administrasi kependudukan (DKB/Dukcapil), estimasi jumlah penduduk tahun 2024 mencapai 238.413 jiwa. Dengan demikian, kepadatan penduduk rata-rata untuk kabupaten ini berada di kisaran $\approx 132 - 139$ jiwa/km², mencerminkan pola pertumbuhan yang cukup moderat (sekitar 0,3 %-0,6 % per tahun) dalam beberapa tahun terakhir.

Dari aspek spasial, kabupaten HSS terbagi ke dalam 11 kecamatan, antara lain: Sungai Raya, Padang Batung, Angkinang, Telaga Langsat, Simpur, Kandangan (ibu kota kabupaten), Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, dan Loksado. Sebagian besar kecamatan di area dataran rendah (termasuk kawasan “Daha”) menunjukkan kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi dibanding kecamatan pegunungan seperti Loksado yang topografinya curam dan permukaan wilayahnya lebih luas namun populasi lebih sedikit.

Tabel 3. Jumlah Penduduk per Kecamatan (Data 2024)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Sungai Raya	18.277
2	Padang Batung	21.656
3	Angkinang	18.780
4	Telaga Langsat	10.346
5	Simpur	15.385
6	Kandangan	49.204
7	Kalumpang	6.586
8	Daha Selatan	41.014
9	Daha Barat	8.063
10	Daha Utara	32.153
11	Loksado	8.496

Secara tren, peningkatan jumlah penduduk HSS dari tahun 2020 ke 2024 menunjukkan kenaikan bersih sekitar +5 556 jiwa (dari 232.857 jiwa ke 238.413 jiwa), dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 0,5 %. Kenaikan ini mencerminkan stabilitas pertumbuhan penduduk di kabupaten yang lebih kecil dibanding banyak kawasan perkotaan besar, dan menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di HSS harus memperhatikan faktor kepadatan dan sebaran penduduk agar pelayanan dasar dan infrastruktur dapat merata.

4.1.5. Komposisi Penduduk

Secara umum, komposisi demografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan piramida penduduk yang masih didominasi usia produktif (15–64 tahun), dengan proporsi anak (0–14 tahun) yang mulai mengecil jika dibandingkan hasil sensus sebelumnya. Struktur kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan pola demografi yang relatif seimbang dan sedang menuju fase transisi menuju masyarakat berstruktur usia produktif dominan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020 dan pembaruan BPS tahun 2024, jumlah penduduk HSS mencapai 232.857 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 100,74, artinya setiap 100 perempuan terdapat sekitar 101 laki-laki. Hal ini menunjukkan keseimbangan distribusi jenis kelamin yang umum terjadi di wilayah agraris dengan migrasi moderat.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten HSS terdiri atas 21,71 % penduduk berusia 0–14 tahun (anak-anak), 67,39 % berusia 15–59 tahun (usia produktif), dan 10,90 % berusia 60 tahun ke atas (lansia). Komposisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk HSS berada pada usia kerja, sehingga menjadi potensi penting dalam penguatan produktivitas daerah dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya manusia.

Dari sisi pendidikan, capaian pendidikan masyarakat HSS terus mengalami perbaikan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 32–34 % penduduk usia 25 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan SMA/ sederajat atau lebih tinggi, sementara sisanya tersebar pada tingkat SMP (± 28 %), SD (± 27 %), dan tidak/belum sekolah (sekitar 10–12 %). Ketimpangan capaian pendidikan masih terlihat antara wilayah perkotaan (Kandangan) dengan daerah perdesaan seperti tiga Daha dan Loksado, yang sebagian penduduknya menghadapi keterbatasan akses pendidikan menengah dan sarana transportasi. Dalam hal komposisi agama, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh pemeluk agama Islam sebanyak 98,34 %, sedangkan

Kristen 0,58 % (terdiri dari Protestan 0,57 % dan Katolik 0,01 %), Hindu 0,18 %, Buddha 0,01 %, dan lainnya 0,89 %. Mayoritas penduduk Muslim tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan pemeluk agama lain umumnya berada di wilayah perkotaan atau desa wisata seperti di Loksado.

Komposisi etnis di HSS memperlihatkan dominasi Suku Banjar, yang menjadi kelompok terbesar dan tersebar hampir di seluruh kecamatan. Di sisi lain, Suku Dayak Meratus menjadi penduduk asli pegunungan Meratus dan banyak bermukim di Kecamatan Loksado. Sementara kelompok etnis lain seperti Jawa, Bugis, Sunda, dan Bakumpai hadir dalam jumlah kecil, terutama di pusat-pusat ekonomi Kandangan dan Sungai Raya. Berdasarkan data terakhir, distribusi etnis meliputi Suku Banjar 190.672 jiwa (± 82 %), Dayak Meratus 3.778 jiwa ($\pm 1,6$ %), Jawa 309 jiwa, Bugis 68 jiwa, Sunda 147 jiwa, dan lainnya sekitar 700 jiwa.

Dengan dominasi usia produktif, rasio jenis kelamin yang seimbang, dan pendidikan menengah-atas yang masih perlu ditingkatkan, kebijakan prioritas HSS perlu menautkan perluasan akses pendidikan menengah/kejuruan, peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu-anak dan lansia, serta penguatan literasi kerja di sentra pertanian rawa (Daha) dan ekowisata-agroforestry (Loksado).

4.2. Kondisi Ekonomi dan Sosial

4.2.1. Struktur Perekonomian (PDRB)

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dianalisis berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan besaran nominal ekonomi pada harga tahun berjalan, dan atas dasar harga konstan (ADHK) yang mengukur volume riil untuk melihat pertumbuhan tanpa dipengaruhi perubahan harga. Secara sektoral, perekonomian HSS secara historis ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian. Dalam kajian pemda berbasis data BPS, rata-rata kontribusi 2013–2023 menunjukkan Pertanian sekitar 24,22% dan Pertambangan 12,79% dari total PDRB (ADHB), diikuti Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor ($\pm 9,29$ %) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib ($\pm 8,80$ %).

Perubahan penting terjadi pada tahun 2023, porsi Pertambangan naik menjadi $\pm 20,53$ % dan sedikit melampaui Pertanian yang turun menjadi $\pm 20,48$ % pada struktur ADHB 2023. Kenaikan peran pertambangan bersamaan dengan bertahannya peran perdagangan sebagai penopang tersier ($\pm 9,51$ %). Pergeseran ini menandai

rebalancing dari dominasi primer tradisional (pertanian) menuju campuran primer-ekstraktif (pertambangan) dan jasa perdagangan. Pada sisi ADHK, tren pertumbuhan HSS melemah pada 2020 dikarenakan pandemi, lalu pulih sepanjang 2021–2023. Dokumen kajian mencatat perlambatan tajam di 2020 diikuti kenaikan output riil 2021–2023; nilai PDRB ADHK naik dari ±Rp4,84 triliun (2021) menjadi ±Rp5,04 triliun (2022), menunjukkan pemulihan aktivitas lintas lapangan usaha.

4.2.2. Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Gini Ratio. Semakin mendekati 0 berarti distribusi pengeluaran/pendapatan makin merata, semakin mendekati 1 berarti makin timpang. Gambaran ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan pola yang relatif terkendali (ketimpangan rendah) namun tetap menyisakan variasi spasial antara wilayah dataran rawa di tiga Daha dan kawasan perbukitan Meratus di Loksado. Pada level provinsi, Gini Ratio Kalimantan Selatan Maret 2025 tercatat 0,287, menurun dari 0,298 pada September 2024; ketimpangan perkotaan (0,304) secara konsisten lebih tinggi daripada perdesaan (0,248). Pola ini menegaskan bahwa konsentrasi aktivitas non-pertanian bernilai tambah dan pasar kerja yang lebih terspesialisasi di kawasan perkotaan cenderung mendorong ketimpangan relatif lebih besar dibanding wilayah desa.

Pada tingkat kabupaten, rujukan terbuka yang tersedia memperlihatkan bahwa ketimpangan HSS berada pada kategori rendah dan cenderung menurun dalam jangka menengah. Dokumen analisis sosial ekonomi daerah menunjukkan penurunan Gini Ratio HSS sepanjang 2016–2020, dengan interpretasi resmi bahwa distribusi pendapatan semakin membaik dan tetap berada pada kategori ketimpangan rendah. Selain itu, rangkuman statistik antardaerah mengindikasikan Gini HSS 2019–2021 berturut-turut sekitar 0,288; 0,300; dan 0,275, yang masih berada pada rentang ketimpangan rendah, seraya mengonfirmasi adanya fluktuasi tahunan yang wajar di tingkat kabupaten.

Disparitas kota–desa dalam konteks HSS dapat dipahami melalui struktur ruangnya: kegiatan perkotaan berpusat di Kandangan (akses layanan, perdagangan, dan jasa lebih padat), sedangkan wilayah perdesaan mendominasi tiga Daha (Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat) dan Loksado. Dengan menautkan pola resmi provinsi (perkotaan lebih timpang daripada perdesaan) dan karakter sektoral lokal

(pertanian/perikanan rawa di Daha; ekowisata, HHBK, dan jasa terbatas di Loksado), ketimpangan di perkotaan HSS kemungkinan lebih tinggi daripada perdesaan, meski data rinci kota–desa khusus HSS belum dipublikasikan terbuka.

Secara intra-kabupaten, diferensiasi Daha–Loksado turut menjelaskan variasi kesejahteraan. Daha yang bertumpu pada pertanian rawa dan perikanan darat rawan terhadap risiko musiman dan fluktuasi harga, tetapi ditopang oleh biaya hidup relatif rendah dan jejaring sosial desa yang kuat. Sebaliknya, Loksado menghadapi biaya logistik dan layanan yang lebih tinggi akibat topografi curam, namun memperoleh peluang pendapatan dari ekowisata (misalnya bamboo rafting dan air terjun) serta hasil hutan bukan kayu; tanpa tata kelola yang inklusif, manfaat wisata berpotensi terkonsentrasi pada pelaku tertentu dan memicu ketimpangan lokal, sementara model berbasis komunitas (homestay, pemandu lokal, produk budaya) dapat memperluas sebaran manfaat.

4.2.3. Sektor Unggulan Daerah

Sektor unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dapat diindikasikan dari karakter sumber daya alam dan struktur ekonomi daerah, serta pengakuan kelembagaan (event, program, dan produk khas). Analisis kuantitatif seperti Location Quotient (LQ) dan shift–share sebaiknya dilaksanakan pada bab/metode tersendiri menggunakan data PDRB menurut lapangan usaha 2019–2023 yang telah tersedia dari BPS HSS; namun untuk keperluan bab deskriptif ini, pengenalan sektor basis dan produk unggulan berikut sudah memadai sebagai kerangka awal.

Pertanian rawa (padi rawa dan inovasi budidaya lahan basah). Wilayah “tiga Daha” (Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat) secara ekologis adalah dataran rendah berawa yang sejak lama menjadi lumbung padi rawa. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan mempraktikkan padi apung sebagai inovasi adaptif di lahan tergenang, yang didorong melalui program daerah dan provinsi pada 2025, menggarisbawahi relevansi sektor pertanian rawa sebagai kandidat sektor basis HSS.

Pariwisata alam Loksado (ekowisata sungai–pegunungan). Loksado merupakan ikon wisata alam HSS, bertumpu pada lanskap Meratus dan atraksi bamboo rafting di Sungai Amandit. Posisi strategisnya sebagai unggulan daerah tercermin dari Festival Bamboo Rafting Loksado yang masuk dalam kurasi nasional Karisma Event Nusantara (KEN) 2024 Kemenparekraf, sebuah pengakuan kualitas event yang berdampak pada daya tarik wisata dan perputaran ekonomi lokal.

UMKM/Ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Produk kuliner dan kerajinan HSS (misalnya dodol Kandangan, sirup rozen/kayu manis/kuwini, madu kelulut, serta tas bambu binaan Dekranasda) tampil konsisten dalam pameran/ekspo daerah dan menjadi materi pembinaan peningkatan mutu menunjukkan penguatan rantai nilai UMKM sebagai pengungkit ekonomi tersier daerah.

4.2.4. Kondisi Sosial dan Kelembagaan Masyarakat

Secara umum, kehidupan sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) ditopang oleh jaringan kelembagaan formal–informal yang cukup beragam, mulai dari lembaga adat, kelompok ekonomi rakyat (koperasi, kelompok tani), hingga forum partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan. Pada sisi kultural, terutama di Kecamatan Loksado, komunitas Dayak Meratus masih mempertahankan pranata adat yang khas. Unit sosial tradisional yang disebut balai berfungsi bukan hanya sebagai hunian komunal, tetapi juga sebagai satuan komunitas yang mengatur ruang hidup, praktik perladangan gilir-balik, serta tata aturan pengelolaan wilayah adat. Hasil pemetaan partisipatif menunjukkan keberadaan ± 38 balai di Loksado, dengan pembagian ruang adat (permukiman, perladangan, kebun, hutan sekunder–primer) dan siklus ritual pertanian yang menjadi penyangga identitas budaya setempat. Pola ini sekaligus menjelaskan kuatnya kohesi sosial dan peran otoritas adat dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas pegunungan Meratus.

Kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh melalui koperasi dan usaha desa. Untuk koperasi, Pemerintah Kabupaten dan BPS juga menyediakan tabel data statistik “Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan” serta dataset sektoral yang diperbarui (2023–2025) melalui portal data terbuka daerah. Keberadaan data ini penting untuk menilai sebaran koperasi hingga tingkat kecamatan dan memantau status keaktifan/jenis kelembagaan koperasi pada tahun berjalan. Di tingkat desa, penguatan BUMDes/BUMDesma tercermin dari ketersediaan dataset sektoral (perkembangan BUMDes, jenis usaha, kinerja/laba, dan persentase BUMDes “beroperasi dengan baik” per kecamatan). Kanal PPID dan portal Open Data HSS mencantumkan paket data tersebut dengan pembaruan hingga pertengahan 2025, menandakan adanya arus data rutin yang bisa dijadikan rujukan ringkas dalam bab gambaran umum.

Pada sektor pertanian, kelompok tani (Poktan/Gapoktan) dan pos penyuluhan menjadi tulang punggung kelembagaan produksi di dataran rawa (tiga Daha) maupun

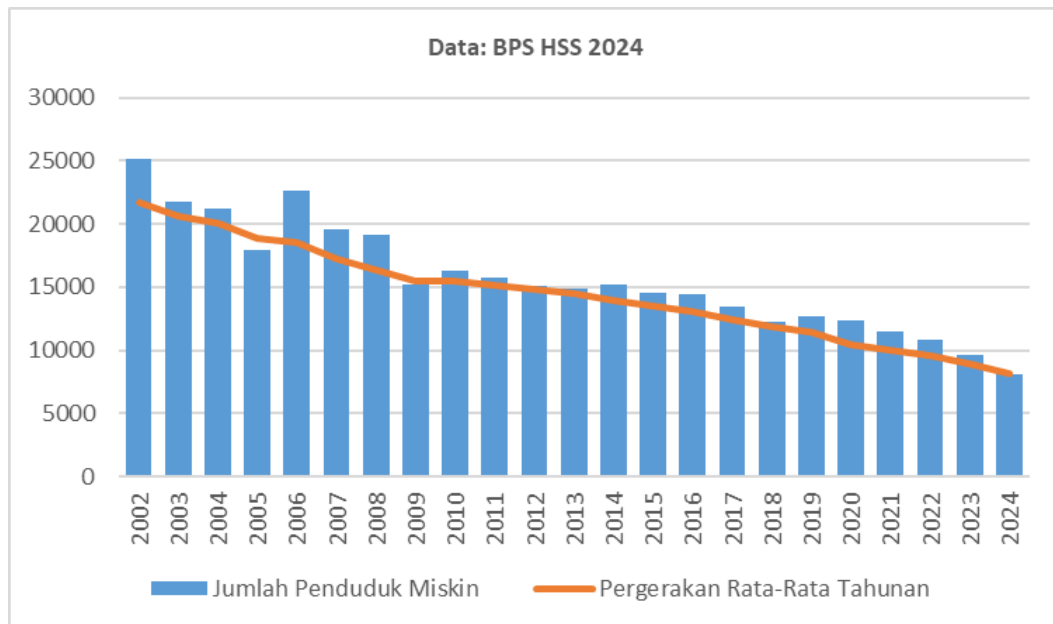
lereng Meratus. Data sektoral Dinas Pertanian HSS mendokumentasikan jumlah pos penyuluhan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan Poktan per wilayah kerja, sementara rilis berita pemerintah daerah mengonfirmasi aktivitas kelembagaan melalui acara panen, adopsi teknologi, dan penyaluran bantuan alsintan kepada >100 kelompok (contoh: 113 Poktan menerima alsintan pada November 2024). Pada level provinsi, buku Statistik Penyuluhan Kementerian Pertanian memberi konteks perbandingan kelas-kelas kelompok tani di Kalimantan Selatan (2024). Informasi-informasi ini memperkuat gambaran adanya ekosistem kelembagaan tani yang aktif di HSS.

Dari sisi partisipasi masyarakat, praktik perencanaan partisipatif rutin terselenggara melalui Musrenbang berjenjang (desa/kelurahan–kecamatan–kabupaten). Pada Musrenbang RKPD 2025, Pemerintah Kabupaten mencatat 1.358 usulan dengan 290 usulan prioritas, dan secara khusus Dapil 3 (Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat) menyumbang 352 usulan (52 prioritas). Kegiatan ini dihadiri unsur DPRD, perangkat daerah, asosiasi pemerintah desa (APDESI), kepala desa/lurah, hingga Forum Anak. Hal ini menunjukkan model partisipasi yang relatif inklusif bagi kelompok pemangku kepentingan lintas umur.

4.3. Kondisi Kemiskinan dan Layanan Dasar

4.3.1. Tren Kemiskinan 2019–2025

Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan tren menurun sepanjang 2019–2024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merekam persentase penduduk miskin HSS di kisaran 5,33% (2019), turun menjadi 5,17% (2020), 4,84% (2021), dan 4,54% (2022). Pada periode selanjutnya, berbagai ringkasan data menempatkan HSS sekitar 4,01% (2023) dan turun lagi menjadi sekitar 3,38% (2024) sehingga berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang sama. Angka-angka ini menegaskan konsistensi penurunan kemiskinan HSS dalam lima–enam tahun terakhir.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin HSS

Sejalan dengan itu, indikator kemiskinan ekstrem (berdasarkan ambang US\$1,90 PPP/hari sebagaimana dipakai pemerintah) juga memperlihatkan perbaikan. Dokumen kebijakan daerah mencatat kemiskinan ekstrem HSS menurun dari 0,78% (2022) menjadi 0,65% (2023). Informasi resmi pemerintah daerah tentang program pensasaran P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) menguatkan bahwa intervensi diarahkan pada rumah tangga miskin ekstrem dengan verifikasi by name–by address, termasuk bantuan pangan dan integrasi program lintas perangkat daerah. Untuk konteks gambaran umum, angka 2024–2025 sedang menunggu rilis terbaru pada level kabupaten dari BPS, sementara arah perbaikan masih konsisten mengikuti pola provinsi.

Dalam konteks spasial internal kabupaten, temuan lapangan yang dirangkum pada bahan ekspos akhir menandai bahwa tiga wilayah Daha (Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat) cenderung menjadi lokus utama rumah tangga miskin ekstrem, dengan karakteristik wilayah dataran rendah berair/tergenang dan akses transportasi yang lebih terbatas dibanding kecamatan lain. Informasi ini relevan sebagai latar untuk subbagian berikutnya tentang layanan dasar dan distribusi rumah tangga miskin ekstrem per kecamatan.

4.3.2. Akses terhadap Layanan Dasar

Secara umum, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadapi tantangan sekaligus menunjukkan capaian dalam menyediakan akses terhadap layanan dasar—yakni air bersih & sanitasi, listrik, pendidikan, dan kesehatan.

1. Akses Air Bersih dan Sanitasi

Persentase rumah tangga yang mendapat akses ke air minum layak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sekitar 72,32 % pada tahun 2021. Sementara itu, sumber air minum utama di tingkat rumah tangga masih cukup dominan dari sumur bor/pompa ($\approx 29,74$ %) dan air permukaan ($\approx 18,63$ %) selain air leding dan kemasan. Dari segi sanitasi, penggunaan tangki septik atau IPAL oleh rumah tangga dilaporkan sangat tinggi, yakni sekitar 99,32 % untuk tempat pembuangan akhir tinja pada tahun 2021. Namun demikian, laporan kinerja pemerintah kabupaten tahun 2019 menyebut bahwa hanya sekitar 84,66 % rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun tingkat akses relatif tinggi, masih ada segmen masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani layanan air bersih dan sanitasi layak.

2. Akses Listrik

Dalam hal penerangan dan sumber energi rumah tangga, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sekitar 99,98 % rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan listrik dari PLN sebagai sumber penerangan utama. Tingkat akses mendekati universal ini menjadi modal penting bagi pembangunan layanan dasar lain seperti pendidikan dan kesehatan.

3. Akses Pendidikan

Mengenai layanan pendidikan, data menunjukkan bahwa persentase anak usia 0–6 tahun yang pernah atau masih mengikuti pendidikan prasekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 63,41 %, artinya masih lebih dari satu dari tiga anak usia dini belum mengikuti prasekolah. Studi provinsi juga mengidentifikasi bahwa pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat. Meskipun demikian, untuk gambaran umum bab ini cukup dicatat bahwa akses ke pendidikan formal dasar (SD–SMA) sudah tersedia di seluruh kecamatan, namun indikator kualitas, pemerataan antar-wilayah (dataran rendah vs pegunungan) perlu menjadi perhatian dalam bab pembahasan selanjutnya.

4. Akses Pelayanan Kesehatan

Pada layanan kesehatan, capaian akses jaminan kesehatan di Kabupaten HSS pada tahun 2023 menunjukkan yang memiliki jaminan kesehatan tercatat sekitar 93,75%, terdiri dari BPJS PBI 79,07%, BPJS non-PBI 13,90%, dan lainnya 0,78%. Data lainnya menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada 2023 mencapai sekitar 14,42%, dan turun menjadi 13,84% pada 2024. Untuk gambaran umum, dapat dikatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, dokter, imunisasi) telah tersebar, namun akses yang sama ke seluruh wilayah, termasuk kecamatan pegunungan seperti Loksado, dan kualitas layanan tetap menjadi tantangan.

5. Distribusi Rumah Tangga Miskin Ekstrem per Kecamatan

Berdasarkan data P3KE yang dipublikasikan melalui dashboard LIWAR Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), rumah tangga miskin ekstrem tercatat di seluruh kecamatan. Pola persebaran menunjukkan konsentrasi relatif lebih tinggi pada wilayah tiga Daha (Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat) yang merupakan kawasan dataran rendah ber-rawa dan berpenduduk padat, sementara Loksado cenderung menampilkan jumlah absolut lebih kecil namun menghadapi barrier geografis (akses perbukitan/lereng Meratus). Contoh halaman per kecamatan yang menampilkan statistik miskin ekstrem antara lain Loksado dan Daha Selatan pada portal resmi LIWAR HSS.

Sebagai gambaran umum kabupaten, HSS berada pada kemiskinan ekstrem sangat rendah, berdasarkan data yang dirilis Bappelitbangda HSS sebesar 0,65% pada 2023, dengan tingkat kemiskinan umum (P0) BPS lebih rendah dibanding rata-rata provinsi pada 2024. Angka-angka ini memberikan konteks bahwa persebaran miskin ekstrem per kecamatan di HSS tidak homogen dan perlu dilihat beriringan dengan struktur kependudukan, akses layanan dasar, serta kondisi geografis masing-masing wilayah.

BAB V

ANALISIS DATA, TEMUAN KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Temuan Hasil Lapangan

Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan pada 11 desa sampel yang mewakili lima kawasan utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS): Daha Selatan, Daha Utara, Angkinang/Padang Batung, Kandangan (urban), dan Loksado (pegunungan). Pemilihan desa didasarkan pada variasi tipologi kemiskinan, kondisi geografis, serta temuan awal dari sumber data P3KE–BNBA 2024. Observasi mendalam dan wawancara dilakukan terhadap rumah tangga miskin ekstrem, perangkat desa, dan penerima bantuan sosial. Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika kemiskinan ekstrem di tingkat rumah tangga, termasuk strategi bertahan hidup, pola pengeluaran, ketergantungan pada bantuan sosial, serta potensi lokal yang dapat dikembangkan.

4.1.1. Temuan Utama Per Desa

a. Daha Selatan (Muning Baru, Tambangan, Baruh Jaya)

Daha Selatan menunjukkan pola kerentanan terkait hunian, pendapatan tidak stabil, dan ketergantungan bansos. Desa Muning Baru menghadapi persoalan tata kelola bantuan, termasuk kepemilikan kartu bantuan yang dikuasai pihak lain. Tambangan memperlihatkan kebutuhan kuat terhadap perbaikan rumah dan modal usaha. Baruh Jaya menunjukkan stabilitas sosial yang lebih baik—rumah tangga tidak mengalami distress berat—namun masih memiliki keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya kesadaran pendidikan.

b. Daha Utara (Pakan Dalam, Pakapuran Kecil, Murung Raya)

Wilayah ini ditandai oleh deprivasi layanan dasar. Pakan Dalam membutuhkan intervensi sanitasi dan WC rumah tangga. Murung Raya memperlihatkan potensi ekonomi lokal melalui peternakan kambing, namun sebagian warga masih bergantung pada keluarga untuk tempat tinggal. Pakapuran Kecil melengkapi gambaran umum wilayah dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara merata.

c. Angkinang / Padang Batung (Pandulangan, Kayu Abang)

Pandulangan dan Kayu Abang menunjukkan pola rumah tangga stabil dan tidak mengalami distress ekstrem, namun masih berada pada kategori miskin karena pendapatan yang tidak meningkat. Kedua desa ini menjadi representasi rumah tangga yang bergantung pada bantuan sosial tetapi belum mampu masuk ke aktivitas produktif.

d. Kandangan (Gambah Luar, Karang Jawa)

Sebagai kawasan semi-urban, Gambah Luar memperlihatkan dinamika gender yang unik, yaitu peran dominan perempuan sebagai pencari nafkah utama. Karang Jawa menunjukkan karakteristik kemiskinan kota: akses layanan dasar relatif baik tetapi peluang ekonomi terbatas. Ketergantungan pada bantuan tetap tinggi.

e. Loksado (Loksado, Loklahung)

Wilayah pegunungan ini menghadapi tantangan struktural terkait akses layanan dasar dan biaya pelayanan yang tinggi. Hunian banyak yang tidak layak, dengan lokasi permukiman terpencar. Geografis menjadi faktor penghambat utama implementasi program pemberdayaan ekonomi.

4.1.2. Pola - Pola Utama Kemiskinan Ekstrem di Desa Sampel

Analisis lintas desa memperlihatkan bahwa kemiskinan ekstrem di Hulu Sungai Selatan tidak bersifat tunggal. Setiap wilayah menunjukkan ciri kerentanan yang berbeda, namun ketika dikompilasi, seluruh temuan mengerucut pada tiga pola besar berikut.

a. Deprivasi Layanan Dasar

Sejumlah desa terutama Pakan Dalam, Muning Baru, Tambangan, Loksado, dan Loklahung menghadapi keterbatasan serius dalam layanan dasar rumah tangga. Kebutuhan paling mendesak meliputi air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan akses kesehatan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga sulit melepaskan diri dari kemiskinan ekstrem meskipun memiliki pendapatan tambahan atau dukungan keluarga. Infrastruktur dasar yang tertinggal, ditambah hambatan geografis terutama di kawasan pegunungan, membuat biaya hidup meningkat dan efektivitas bantuan menurun. Pola ini menunjukkan bahwa perbaikan layanan dasar merupakan fondasi utama bagi pengurangan kemiskinan ekstrem di desa-desa tersebut.

b. Rumah Tangga Stabil tetapi Stagnan

Desa seperti Baruh Jaya, Pandulangan, dan sebagian kawasan urban memperlihatkan karakteristik rumah tangga yang tidak mengalami distress ekstrem, namun tetap berada dalam kategori miskin ekstrem karena pendapatan mereka stagnan. Mereka umumnya memiliki rumah sendiri, tidak menjual aset produktif, dan tidak mengambil keputusan ekonomi ekstrem seperti menghentikan sekolah anak. Namun, mereka masih bergantung pada bantuan sosial dan belum mampu masuk ke aktivitas produktif yang lebih menguntungkan. Rumah tangga dalam pola ini membutuhkan intervensi peningkatan kapasitas ekonomi, bukan lagi bantuan darurat. Pendekatan yang tepat mencakup pelatihan usaha mikro, bantuan modal terarah, serta penguatan akses pasar dan layanan keuangan.

c. Potensi Ekonomi Berbasis Komoditas Lokal

Beberapa desa memiliki potensi ekonomi yang jelas untuk dikembangkan. Murung Raya menunjukkan kekuatan pada komoditas ternak kambing, sementara wilayah Daha Selatan memiliki peluang besar di sektor pertanian, dan kawasan Loksado memiliki potensi kuat untuk ekowisata. Rumah tangga di wilayah ini tidak memiliki masalah layanan dasar sebesar *Cluster* pertama, dan tidak sepenuhnya stagnan seperti *Cluster* kedua. Tantangan mereka lebih pada keterbatasan modal, akses pembiayaan, serta lemahnya struktur kelembagaan desa untuk mendukung pengembangan sektor unggulan. Dengan dukungan modal bergulir, program pemberdayaan, dan pendampingan pasar, potensi komoditas lokal ini dapat menjadi pengungkit utama peningkatan pendapatan.

Untuk memberikan gambaran lebih ringkas mengenai variasi kondisi antar desa, temuan kualitatif di atas kemudian dirangkum dalam bentuk tabel. Tabel 4 berikut memadukan tiga dimensi utama: karakteristik rumah tangga, strategi bertahan hidup, dan kebutuhan prioritas yang muncul dari wawancara dan observasi di setiap lokasi sampel.

Tabel 4. Ringkasan Temuan Lapangan Per Desa

Desa	Karakteristik Utama	Strategi Bertahan	Kebutuhan Prioritas
Muning Baru	Tata kelola bansos bermasalah; kartu bantuan dikuasai pihak lain	Berutang, konsumsi minimal	Bedah rumah, perbaikan rumah
Tambangan	Hunian kurang layak; pendapatan harian rendah	Mengurangi konsumsi, utang	Perbaikan rumah, modal usaha
Baruh Jaya	Rumah tangga stabil; daya juang tinggi; pendidikan rendah	Konsumsi terkontrol	Akses kesehatan, subsidi pertanian
Pakapuran Kecil	Deprivasi layanan dasar	Konsumsi dikurangi	Air bersih, sanitasi
Pakan Dalam	Kesenjangan sanitasi & jaminan kesehatan	Ketergantungan bansos	WC, sanitasi, rumah layak
Murung Raya	Potensi peternakan; sebagian tinggal menumpang	Bantuan keluarga	Ternak kambing, perbaikan rumah
Pandulangan	Rumah tangga stabil namun stagnan	Bergantung PKH	Pemberdayaan usaha
Kayu Abang	Pola similar Pandulangan	Pengeluaran terkendali	Layanan dasar
Gambah Luar	Perempuan jadi tulang punggung ekonomi	Pendapatan informal	Perbaikan rumah, UMKM
Karang Jawa	Kemiskinan perkotaan; peluang ekonomi terbatas	Konsumsi minimal	Modal usaha
Loksado	Geografis berat; rumah tak layak	Strategi survival dasar	Bedah rumah, akses layanan dasar
Loklahung	Akses sulit; layanan terbatas	Bantuan keluarga	Infrastruktur, perbaikan rumah

Ringkasan pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa setiap desa memiliki kombinasi kerentanan dan potensi yang berbeda. Ada desa yang membutuhkan perbaikan layanan dasar, ada yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi, dan ada pula yang memiliki peluang sektor unggulan tetapi belum didukung modal maupun kelembagaan yang memadai. Gambaran ini penting sebagai dasar penyusunan

Cluster intervensi, analisis SWOT, serta penentuan strategi program prioritas yang lebih terarah. Dengan memahami karakteristik masing-masing desa, pemerintah daerah dapat merancang intervensi yang lebih presisi, efektif, dan sesuai konteks lokal.

4.1.3. Analisis *Cluster* Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Analisis *Cluster* memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai karakteristik kemiskinan ekstrem di Hulu Sungai Selatan. Pemetaan ini membantu membedakan desa-desa yang membutuhkan perbaikan layanan dasar dari desa yang sudah stabil tetapi stagnan, serta desa yang memiliki potensi ekonomi kuat untuk dikembangkan. Dengan memahami karakter setiap *Cluster*, intervensi dapat dirancang lebih presisi dan selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

1. *Cluster* 1: Deprivasi Layanan Dasar

Cluster ini merupakan kelompok paling rentan dan membutuhkan intervensi mendasar sebelum program peningkatan pendapatan dapat diberikan. Rumah tangga dalam *Cluster* ini tidak memiliki layanan dasar yang memadai, sehingga sulit melakukan aktivitas ekonomi yang stabil. Kondisi lingkungan dan infrastruktur yang minim membuat risiko kesehatan meningkat dan biaya hidup jauh lebih tinggi dibanding desa lain.

Tabel 5. Akar Persoalan *Cluster* 1 dan Implikasi Kebijakan Utama

No.	Akar Persoalan Utama	Implikasi Kebijakan
1.	Sanitasi buruk dan kondisi rumah yang tidak layak, yang membuat keluarga rentan secara kesehatan.	Program bedah rumah, jambanisasi, air bersih, dan akses kesehatan harus menjadi prioritas utama.
2.	Akses transportasi yang sulit, terutama di wilayah pegunungan, sehingga biaya logistik, kesehatan, dan kebutuhan harian lebih tinggi.	Desa dengan kondisi geografis ekstrem membutuhkan layanan bergerak (<i>mobile service</i>) untuk kesehatan dan administrasi dasar.

3. Ketergantungan pada bantuan sosial lebih disebabkan keterbatasan struktural bukan karena kurangnya kemauan untuk bekerja atau berusaha. Intervensi ekonomi produktif belum tepat dilakukan sebelum fondasi layanan dasar diperbaiki.

Cluster ini menjadi prioritas jangka pendek karena perbaikan layanan dasar akan langsung meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko kemiskinan ekstrem berkelanjutan.

2. **Cluster 2: Rumah Tangga Stabil tetapi Stagnan**

Rumah tangga dalam *Cluster* ini memiliki kondisi sosial yang relatif stabil. Mereka tidak mengalami distress ekstrem, tidak menjual aset, dan tidak membuat keputusan survival yang berat. Namun, mereka tetap berada dalam kategori miskin ekstrem karena pendapatan yang stagnan dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi.

Tabel 6. Akar Persoalan *Cluster* 2 dan Implikasi Kebijakan Utama

No.	Akar Persoalan Utama	Implikasi Kebijakan
1.	Ketergantungan bansos yang berkepanjangan tanpa disertai peningkatan kapasitas ekonomi.	Diperlukan program pemberdayaan ekonomi, seperti UMKM mikro dan usaha rumahan.
2.	Akses yang rendah terhadap modal, pasar, dan dukungan usaha.	Pemerintah perlu menerapkan graduasi bansos bertahap untuk keluarga yang sudah stabil.
3.	Aktivitas ekonomi kecil yang tidak berkembang sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan.	Pelatihan keterampilan, akses KUR mikro, dan pendampingan usaha menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi.
4.	Kompetensi usaha masih terbatas atau belum matang.	Usaha rumah tangga harus dihubungkan dengan pasar lokal, termasuk melalui BUMDes atau koperasi sebagai agregator.

Cluster ini adalah kelompok yang paling cepat untuk “naik kelas” apabila intervensi pemberdayaan dilakukan secara tepat sasaran.

3. *Cluster* 3: Potensi Ekonomi Berbasis Komoditas

Cluster ini berisi desa-desa dengan peluang pertumbuhan ekonomi yang paling besar. Rumah tangga memiliki landasan sosial yang lebih kuat, dan wilayahnya memiliki komoditas unggulan yang bisa dikembangkan—baik itu pertanian, peternakan, maupun ekowisata.

Tabel 7. Akar Persoalan *Cluster* 3 dan Implikasi Kebijakan Utama

No.	Akar Persoalan Utama	Implikasi Kebijakan
1.	Modal usaha yang rendah sehingga potensi tidak dapat dioptimalkan.	Program modal bergulir dan hibah alat untuk peternakan, pertanian, dan wisata desa perlu diprioritaskan.
2.	Pasar dan harga komoditas belum stabil.	Pemerintah perlu membangun kemitraan dengan off-taker, koperasi, dan BUMDes agar pasarnya lebih stabil.
3.	Keterbatasan teknologi produksi dan manajemen usaha.	Pendampingan usaha jangka menengah diperlukan agar rumah tangga mampu naik kelas.
4.	Kelembagaan ekonomi desa (koperasi, kelompok tani, BUMDes) belum cukup kuat untuk mendukung pengembangan komoditas.	Pengembangan rantai nilai komoditas (value chain) akan memperkuat posisi desa dalam ekonomi lokal.

Cluster ini memiliki potensi menjadi motor utama penurunan kemiskinan ekstrem karena memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Pemetaan tiga *Cluster* kemiskinan ekstrem di Hulu Sungai Selatan memberikan dasar yang kuat untuk merancang arah kebijakan yang lebih terarah.

Setiap *Cluster* memiliki karakter kerentanan, kapasitas rumah tangga, dan kondisi spasial yang berbeda sehingga intervensi tidak dapat dilakukan secara seragam. Integrasi hasil analisis *Cluster* ini membantu menghubungkan kondisi lapangan dengan fokus kebijakan makro kabupaten dan pendekatan mikro di tingkat desa dan rumah tangga. Secara makro, hasil *Cluster* menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan ekstrem di HSS tidak cukup hanya melalui perluasan bantuan sosial, tetapi membutuhkan kombinasi kebijakan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan potensi lokal. Sementara pada level mikro, masing-masing desa dan rumah tangga memerlukan solusi yang berbeda sesuai masalah struktural, perilaku ekonomi, serta akses terhadap peluang. Arah kebijakan berdasarkan karakter *Cluster* dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 8. Integrasi *Cluster* dengan Arah Kebijakan Makro dan Mikro

No.	<i>Cluster</i>	Fokus Utama	Arah Kebijakan Makro	Pendekatan Mikro (Rumah Tangga/Desa)
1.	<i>Cluster</i> 1 Desa layanan dasar tertinggal	Layanan dasar	Pembangunan infrastruktur dasar (air, sanitasi, rumah layak); penguatan layanan publik di wilayah sulit	Bedah rumah, jambanisasi, layanan kesehatan bergerak, dukungan logistik dasar
2.	<i>Cluster</i> 2 Rumah tangga stabil tetapi stagnan	Pemberdayaan ekonomi	Perluasan program ekonomi kerakyatan dan pembiayaan mikro	Pelatihan usaha, akses modal, graduasi bansos bertahap, pendampingan UMKM mikro
3.	<i>Cluster</i> 3 Desa dengan potensi komoditas	Pengembangan ekonomi produktif	Penguatan ekonomi lokal dan rantai nilai komoditas unggulan	Modal ternak/alat produksi, kemitraan off-taker, pembentukan unit usaha desa/BUMDes

Dengan integrasi *Cluster* ini, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih presisi dan tidak bersifat generik. *Cluster* 1 difokuskan pada penyediaan layanan dasar, *Cluster* 2 pada pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan *Cluster* 3 pada pengembangan potensi komoditas berbasis wilayah. Pemahaman yang terstruktur ini menjadi landasan kuat untuk merumuskan strategi daerah berikutnya—baik dalam jangka pendek (penurunan angka kemiskinan ekstrem), maupun dalam jangka menengah (penguatan ekonomi lokal). Bagian selanjutnya akan menguraikan arah kebijakan dan prioritas program yang dapat diterapkan untuk masing-masing *Cluster*.

4.2. Analisis SWOT Program Penanggulangan Kemiskinan

Sebelum menyusun strategi teknis penanganan kemiskinan ekstrem, pemetaan SWOT memberikan gambaran lengkap mengenai kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang eksternal yang bisa dioptimalkan, serta ancaman yang harus diantisipasi. Matriks berikut mengintegrasikan temuan lapangan, diskusi dan FGD dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis *Cluster* wilayah.

Tabel 9. Matriks SWOT Penurunan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan distress ekstrem (tidak ada jual aset atau putus sekolah). 2. Bansos menjangkau sebagian besar rumah tangga dan efektif menjaga konsumsi. 3. Terdapat sumber pendapatan sekunder (hasil sungai, ternak kecil, buruh harian). 4. Masyarakat kooperatif dan mudah dijangkau pada saat kunjungan lapangan. 5. Potensi sektor lokal kuat: pertanian (Daha), peternakan (Murung Raya), wisata (Loksado). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Under-reporting pendapatan – banyak penghasilan sampingan tidak dilaporkan. 2. Kapasitas usaha rendah, risk-averse, dan hampir tidak ada akses kredit formal. 3. Fasilitas dasar antar desa tidak merata (air bersih, rumah layak, sanitasi). 4. Akses geografis sulit terutama di wilayah pegunungan. 5. Ketergantungan tinggi pada bantuan sosial.

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
1. Sinkronisasi data P3KE–BNBA 2024 menciptakan akurasi sasaran tinggi.	1. Ketergantungan pada bansos jangka panjang.
2. Potensi realokasi bansos Rp 26 miliar untuk program produktif.	2. Risiko musim dan fluktuasi harga pangan memengaruhi pendapatan agraris.
3. Potensi unggulan wilayah: wisata, ternak, pertanian berbasis klaster.	3. Infrastruktur dasar tidak merata di wilayah tertentu.
4. Kebutuhan masyarakat jelas dan mudah dirumuskan (air bersih, rumah layak, modal).	4. Akses pembiayaan yang sangat rendah.
5. Klasterisasi wilayah memudahkan desain intervensi terarah.	5. Geografi ekstrem meningkatkan biaya layanan publik.

Setelah memetakan faktor-faktor SWOT secara kualitatif, langkah berikutnya adalah melakukan pembobotan dan skoring menggunakan metode IFAS–EFAS. Metode ini memberikan ukuran kuantitatif terhadap masing-masing faktor, sehingga dapat diketahui aspek mana yang paling berpengaruh terhadap posisi strategis HSS. Penilaian dilakukan dengan:

- Bobot total = 1 per kelompok (S/W/O/T),
- Rating 1–5,
- Skor = Bobot × Rating.

Hasil skoring menjadi dasar untuk menentukan apakah HSS berada pada posisi yang kuat atau lemah secara internal, serta berada dalam lingkungan eksternal yang mendukung atau penuh ancaman.

Tabel 10. Skoring Strength

No	Strength (S)	Bobot	Rating (1–5)	Skor
S1	Tidak ada distress ekstrem (jual aset/putus sekolah)	0.25	5	1.25
S2	Bansos menjangkau & menjaga konsumsi	0.20	4	0.80
S3	Variasi pendapatan sekunder rumah tangga	0.15	4	0.60
S4	Masyarakat kooperatif & akses sosial baik	0.15	4	0.60

S5	Potensi sektor unggulan (pertanian, ternak, wisata)	0.25	5	1.25
TOTAL S		1.00		4.50

Skor 4.50 menggambarkan bahwa kekuatan internal HSS berada pada level yang solid dan mampu menjadi penopang utama dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Salah satu faktor paling menentukan adalah tidaknya ditemukan distress ekstrem di rumah tangga sasaran, seperti kasus penjualan aset produktif atau anak yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga masih memiliki kemampuan dasar untuk bertahan tanpa harus mengorbankan aset jangka panjang, sehingga intervensi pemerintah dapat langsung diarahkan pada penguatan pendapatan, bukan sekadar penanganan krisis.

Kekuatan besar lainnya terletak pada potensi ekonomi lokal yang sangat kuat, terutama pada tiga wilayah kunci: pertanian di kawasan Daha, peternakan di Murung Raya, dan sektor wisata di Loksado. Ketiga potensi ini membuka ruang pengembangan ekonomi produktif yang jelas dan realistis untuk dimanfaatkan sebagai sumber peningkatan pendapatan rumah tangga miskin ekstrem. Kombinasi antara stabilitas sosial dan ketersediaan potensi lokal ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi HSS untuk mengadopsi strategi pertumbuhan (*growth strategy*), karena rumah tangga sasaran tidak berada dalam kondisi survival mode dan dapat diarahkan menuju aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Tabel 11. Skoring Weakness

No	Weakness (W)	Bobot	Rating (1–5)	Skor
W1	Under-reporting pendapatan (income under-report)	0.30	5	1.50
W2	Kapasitas usaha rendah (risk-averse, modal minim)	0.20	4	0.80
W3	Kesenjangan fasilitas dasar antar desa	0.20	4	0.80
W4	Akses geografis sulit (logistik/pegunungan)	0.15	3	0.45

W5	Ketergantungan bansos relatif tinggi	0.15	5	0.75
TOTAL W		1.00		4.30

Skor 4.30 menunjukkan bahwa kelemahan internal HSS masih cukup berat dan perlu ditangani dengan cepat agar tidak menghambat percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Kelemahan paling mendasar adalah under-reporting pendapatan, yang membuat data kemiskinan kurang akurat dan berisiko menghasilkan sasaran program yang keliru. Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan rumah tangga pada bantuan sosial, yang dapat memperlambat mobilitas ekonomi karena sebagian keluarga belum terdorong untuk beralih ke aktivitas yang lebih produktif.

Kelemahan lain yang cukup menonjol adalah ketimpangan fasilitas dasar antarwilayah, terutama di klaster 3D, yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni. Kesenjangan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup rumah tangga sasaran dan membatasi potensi peningkatan pendapatan mereka. Secara keseluruhan, kelemahan HSS bersifat struktural berkaitan dengan data, perilaku ekonomi rumah tangga, dan kualitas layanan dasar sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan intervensi lintas program dan lintas perangkat daerah agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 12. Skoring Opportunity

No	Opportunity (O)	Bobot	Rating (1–5)	Skor
O1	Sinkronisasi data P3KE–	0.30	5	1.50
	BNBA 2024 (momentum akurasi)			
O2	Potensi realokasi bansos ke program produktif (anggaran terfokus)	0.25	5	1.25
O3	Potensi unggulan klaster (ternak, padi, wisata)	0.15	4	0.60
O4	Klasterisasi memudahkan targeting intervensi	0.15	4	0.60

	Permintaan masyarakat			
O5	terukur (air, rumah, modal usaha)	0.15	4	0.60
TOTAL O		1.00		4,55

Skor 4.55, yang menjadi nilai tertinggi di antara seluruh komponen SWOT, menunjukkan bahwa HSS berada pada momentum emas untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem. Peluang terbesar muncul dari proses sinkronisasi data P3KE–BNBA 2024, yang membuka jalan bagi pensasaran program yang jauh lebih akurat dan minim bias. Ketepatan data ini penting karena menjadi dasar bagi seluruh intervensi, mulai dari bantuan sosial hingga program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, terdapat peluang strategis untuk mengalihkan sebagian bantuan sosial ke aktivitas produktif, sehingga rumah tangga sasaran tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga dapat membangun sumber pendapatan baru. Kombinasi ini diperkuat oleh keunggulan klaster wilayah—seperti sektor pertanian di Daha, peternakan di Murung Raya, dan wisata di Loksado—yang memungkinkan pemerintah merancang intervensi tematik sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Secara keseluruhan, kondisi eksternal sangat mendukung upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, asalkan pemerintah daerah mampu bergerak cepat, terkoordinasi, dan memanfaatkan peluang ini secara terarah.

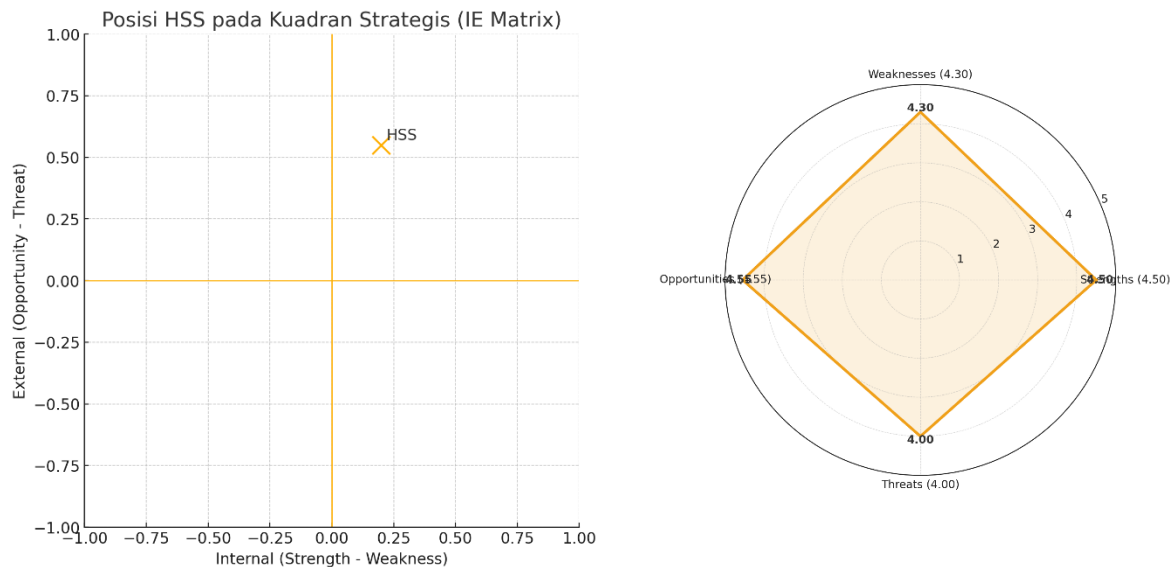
Tabel 13. Skoring Threats

No	Threat (T)	Bobot	Rating (1–5)	Skor
T1	Ketergantungan bansos jangka panjang	0.30	5	1.50
T2	Risiko musim & fluktuasi harga pangan	0.15	3	0.45
T3	Infrastruktur dasar tidak merata	0.20	4	0.80
T4	Akses pembiayaan formal sangat rendah	0.20	4	0.80

T5	Geografi ekstrem → biaya layanan publik tinggi	0.15	3	0.45
TOTAL T			1.00	4.00

Skor 4.00 menunjukkan bahwa ancaman terhadap upaya penurunan kemiskinan ekstrem di HSS masih nyata, meskipun tidak mendominasi keseluruhan situasi. Ancaman paling menonjol berasal dari risiko ketergantungan masyarakat pada bansos, yang dapat menghambat transisi menuju kemandirian ekonomi. Selain itu, akses pembiayaan yang sangat rendah membuat rumah tangga miskin ekstrem dan pelaku usaha kecil sulit mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Kondisi ini diperberat oleh geografi yang ekstrem, terutama di wilayah pegunungan seperti Loksado, di mana akses layanan publik membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar. Hambatan geografis tersebut bukan hanya berpengaruh pada mobilitas dan distribusi bantuan, tetapi juga menurunkan efisiensi program pemberdayaan ekonomi karena keterbatasan infrastruktur dasar. Ancaman-ancaman ini umumnya terkonsentrasi di desa-desa terpencil dan wilayah dengan akses terbatas, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan spesifik wilayah agar program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang merata.

Skor komposit dari masing-masing kelompok kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram layang (radar chart). Visualisasi ini membantu melihat keseimbangan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara lebih intuitif. Dengan menampilkan seluruh skor S–W–O–T dalam satu bidang, diagram layang mampu menunjukkan aspek-aspek yang dominan maupun yang masih lemah. Grafik ini juga menjadi dasar untuk memetakan HSS ke dalam kuadran strategi (IE Matrix) seperti pada grafik dibawah ini:



Gambar 2. Digaram Layang Posisi Kabupaten HSS dalam Kuadara Strategis

Dari bentuk poligonnya terlihat jelas bahwa sisi Strengths dan Opportunities membentang paling jauh, menandakan bahwa kedua faktor ini merupakan penentu utama dalam dinamika kemiskinan ekstrem di HSS. Sebaliknya, Weaknesses dan Threats tampak lebih pendek, menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan struktural dan ancaman geografis, keduanya masih berada dalam rentang yang dapat dikelola. Visualisasi ini sekaligus menegaskan beberapa poin penting:

1. Dominasi Peluang dan Kekuatan. Pola yang mengarah kuat ke sumbu Strengths dan Opportunities mengindikasikan bahwa HSS berada pada posisi yang sangat mendukung untuk melakukan percepatan melalui strategi agresif, terutama yang bersifat produktif dan berbasis potensi lokal.
2. Kelemahan yang Perlu Direduksi. Nilai Weaknesses yang cukup tinggi menandakan bahwa perbaikan data, fasilitas dasar, serta transisi dari ketergantungan bansos harus menjadi fokus awal sebelum program produktif diperluas.

3. Ancaman yang Terkendali. Skor Threats menunjukkan bahwa risiko eksternal memang ada, terutama di wilayah sulit akses, tetapi masih dalam tingkat yang dapat dimitigasi melalui intervensi yang tepat dan berbasis klaster.

Gabungan antara skor kuat pada Strengths dan Opportunities inilah yang menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Kuadran I (Grow & Build Strategy) dalam IE Matrix—posisi strategis terbaik untuk mendorong intervensi peningkatan pendapatan, program graduation, dan pemanfaatan potensi ekonomi desa secara lebih intensif. Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya memiliki modal internal yang kuat, tetapi juga peluang eksternal yang besar untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem secara terukur dan berkelanjutan.

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Arah kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) disusun berdasarkan rangkaian temuan lapangan, pemetaan *Cluster* desa dan rumah tangga, hasil analisis SWOT daerah, kondisi makro wilayah, serta pembelajaran dari daerah lain yang telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem. Pemetaan *Cluster* menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di HSS memiliki pola yang beragam mulai dari desa yang menghadapi deprivasi layanan dasar, desa yang stabil tetapi stagnan secara ekonomi, hingga desa yang memiliki potensi komoditas untuk dikembangkan. Di sisi lain, analisis SWOT memperlihatkan bahwa HSS memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang cukup besar, sementara kelemahan dan ancaman yang ada cenderung bersifat struktural dan masih dapat dikelola.

Integrasi berbagai analisis tersebut menghasilkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi dan realistis. Desa-desa dengan keterbatasan layanan dasar membutuhkan intervensi fondasional, desa yang stabil tetapi stagnan perlu didorong melalui program pemberdayaan ekonomi, sementara desa dengan potensi komoditas diarahkan pada pengembangan usaha produktif dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan karakter wilayah dan kapasitas perangkat daerah, sekaligus menjadi landasan kuat untuk mempercepat pencapaian target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan arah strategis yang lebih terarah dan berbasis bukti, intervensi pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan di seluruh desa prioritas di HSS.

4.3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan pada sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam kerangka waktu yang realistis. Tujuan utamanya adalah mewujudkan *zero extreme poverty* pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, empat sasaran strategis difokuskan sebagai landasan intervensi pemerintah daerah:

1. Penurunan jumlah rumah tangga miskin ekstrem setiap tahun
Upaya ini diprioritaskan pada desa-desa yang masuk *Cluster 1* dan *Cluster 2*, di mana kerentanan paling tinggi dan potensi peningkatan pendapatan masih terbatas. Pengurangan progresif dilakukan agar tren penurunan dapat dipantau dengan jelas di setiap tahun anggaran.
2. Percepatan pemenuhan layanan dasar pada wilayah prioritas
Langkah ini terutama diarahkan pada:
 - a. kawasan 3 Daha yang mengalami kesenjangan sanitasi dan hunian layak,
 - b. wilayah Loksado yang menghadapi hambatan geografis dan biaya layanan publik yang tinggi,
 - c. serta kawasan urban Kandangan yang memerlukan pendekatan berbeda karena pola kemiskinan lebih terkait stagnasi pendapatan.
 Pemenuhan air bersih, sanitasi, dan perumahan layak menjadi komponen kunci untuk mengurangi beban rumah tangga.
3. Peningkatan pendapatan melalui penguatan usaha produktif
Rumah tangga didorong untuk meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pengembangan usaha kecil, pemanfaatan potensi lokal, dan integrasi dengan pasar. Pendampingan, modal usaha, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi katalis utama dalam proses ini.
4. Penguatan akurasi pensasaran melalui pembaruan data terintegrasi
Validasi lapangan berkala dan sinkronisasi data lintas sistem—DTKS, P3KE, BNBA, dan data desa—diterapkan untuk memastikan seluruh intervensi benar-benar tepat sasaran. Ketepatan data menjadi dasar bagi desain program yang efisien dan berkeadilan.
5. Keempat sasaran ini saling melengkapi dan membentuk arah kebijakan yang lebih presisi, sehingga percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di HSS dapat berlangsung secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

4.3.2. Pilar Strategi Utama

Empat pilar strategi penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun untuk menjawab akar persoalan yang muncul dari temuan lapangan, pemetaan *Cluster* desa, dan hasil analisis SWOT wilayah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem tidak semata disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan akses layanan dasar yang timpang, karakter geografis desa, perilaku ekonomi rumah tangga, serta kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Dengan kombinasi faktor tersebut, kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem harus dirancang secara terarah dan sesuai konteks masing-masing *Cluster*: desa dengan deprivasi layanan dasar membutuhkan fondasi fisik yang lebih kuat, desa yang stabil tetapi stagnan memerlukan dorongan pemberdayaan ekonomi, sementara desa berpotensi tinggi perlu didukung dengan akses modal dan pasar. Oleh karena itu, empat pilar berikut dirumuskan untuk memastikan intervensi pemerintah berjalan saling melengkapi dimulai dari perbaikan layanan dasar, penataan tata kelola bantuan sosial, peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga, hingga penguatan kualitas SDM. Kerangka ini menjadi dasar bagi pembangunan kebijakan yang lebih presisi, berkelanjutan, dan mampu mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah HSS.

1. Pilar 1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Bansos

Pilar pertama menekankan bahwa jaring pengaman sosial harus bekerja secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Bansos tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga konsumsi rumah tangga miskin ekstrem, namun perlu dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan integrasi data. Analisis lapangan dan *Cluster* menunjukkan bahwa:

- a. sebagian besar rumah tangga miskin ekstrem masih mengandalkan bantuan sosial,
- b. terdapat under-reporting pendapatan yang menyebabkan bias data,
- c. dan ada kasus penyalahgunaan kartu bantuan serta duplikasi penerima.

Kondisi ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola adalah prasyarat bagi pengurangan kemiskinan ekstrem yang efektif. Arah kebijakan yang dapat ditempuh:

- a. Integrasi Data Satu Pintu

Penyatuan basis data DTKS, P3KE, BNBA, dan hasil verifikasi desa secara berkala untuk meningkatkan akurasi sasaran.

b. Validasi dan Audit Lapangan

Spot check penghasilan dan kondisi rumah secara periodik untuk mengurangi bias dan manipulasi data.

c. Perbaikan Mekanisme Penyaluran

Penguatan mekanisme kontrol desa, transparansi daftar penerima, serta pengawasan terhadap pihak yang memegang kartu bantuan.

d. Graduasi Bansos Bertahap

Rumah tangga pada *Cluster 2* (stabil tetapi stagnan) didorong untuk beralih dari bansos ke usaha produktif.

e. Top-Up Berbasis Kesenjangan Garis Kemiskinan

Intervensi tambahan diberikan bagi rumah tangga yang pendapatannya jauh di bawah garis kemiskinan ekstrem.

f. Integrasi Bansos dengan Program Ekonomi

Bansos tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi fase transisi menuju kemandirian ekonomi melalui program usaha mikro.

Fokus utama pilar ini adalah memastikan rumah tangga miskin ekstrem tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, sekaligus mengurangi ketergantungan jangka panjang pada bantuan sosial. Upaya ini diiringi dengan peningkatan akurasi pensasaran melalui integrasi data dan verifikasi lapangan yang lebih ketat, sehingga setiap bentuk bantuan benar-benar diterima oleh rumah tangga yang paling membutuhkan.

2. Pilar 2. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Rumah Layak Huni

Pilar ini menyasar akar struktural kemiskinan, terutama pada desa-desa *Cluster 1* yang mengalami deprivasi layanan dasar. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perumahan tidak layak, sanitasi buruk, serta akses air bersih yang terbatas menjadi hambatan besar bagi rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pilar 2 penting karena:

- a. Rumah tidak layak memperburuk kesehatan keluarga dan meningkatkan biaya pengobatan.
- b. Sanitasi buruk berhubungan langsung dengan stunting, penyakit kulit, dan infeksi.
- c. Akses geografis sulit (Loksado, Loklahung) meningkatkan biaya logistik, transportasi, dan layanan publik.

d. Tanpa layanan dasar, intervensi ekonomi tidak akan efektif.

Arah kebijakan yang dapat ditempuh:

a. Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni

Program bedah rumah lengkap (atap, lantai, dinding) berbasis prioritas desa.

b. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Pembangunan WC, septic tank kedap, pipanisasi lokal, atau sumur bor.

c. Infrastruktur Desa Prioritas

Membangun atau memperbaiki akses jalan desa yang kritis untuk menurunkan biaya logistik.

d. Mobile Service

Layanan kesehatan bergerak dan pelayanan administrasi dasar untuk desa pegunungan.

e. Peningkatan Akses Kesehatan Primer

Optimalisasi Pustu, Poskesdes, tenaga kesehatan desa, dan sistem rujukan cepat.

f. Sinkronisasi Program Infrastruktur

Mengintegrasikan bantuan fisik dengan pola pembangunan RPJMD, Dana Desa, dan program OPD.

Fokus utama pilar ini adalah memperkuat fondasi layanan dasar yang menjadi prasyarat bagi rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Tanpa akses air bersih, sanitasi layak, hunian yang aman, serta layanan kesehatan yang dapat dijangkau, upaya peningkatan pendapatan tidak akan berjalan efektif. Karena itu, perbaikan infrastruktur dasar diposisikan sebagai langkah awal yang harus dipenuhi sebelum intervensi ekonomi dapat memberikan hasil yang optimal.

3. Pilar 3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pilar ketiga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin ekstrem secara produktif. Data lapangan menunjukkan potensi ekonomi yang kuat: pertanian di Daha, peternakan di Murung Raya, dan wisata di Loksado. Namun potensi ini belum optimal karena keterbatasan modal, akses pasar, dan kelembagaan. Pilar ke 3 penting karena:

a. *Cluster 2* (rumah tangga stabil tetapi stagnan) membutuhkan dukungan usaha, bukan sekadar bansos.

- b. *Cluster* 3 memiliki komoditas unggulan tetapi kekurangan modal dan struktur pasar.
- c. Hampir semua desa memiliki peluang ekonomi mikro yang bisa dikembangkan.

Arah kebijakan yang dapat ditempuh:

- a. Penguatan UMKM Mikro
Mendukung usaha warung, kuliner rumahan, kerajinan, jasa, dan pertanian kecil melalui modal usaha dan pelatihan.
- b. Pengembangan Komoditas Unggulan
 - 1) Ternak kambing di Murung Raya dan sekitarnya.
 - 2) Pertanian padi dan sayur di kawasan Daha.
 - 3) Ekowisata dan produk turunannya di Loksado.
- c. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
Transformasi BUMDes menjadi agregator pemasaran dan penjamin pasar bagi produk lokal.
- d. Akses Pembiayaan
Fasilitasi KUR super mikro, UMi, LPDB-KUMKM, CSR, dan kredit koperasi.
- e. Pengembangan Value Chain Komoditas
Membangun rantai nilai yang jelas, termasuk penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran.
- f. Pendampingan dan Monitoring Usaha
Pendampingan jangka menengah agar usaha tidak berhenti pada tahap awal. Fokus utama pilar ini adalah mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga secara nyata dan berkelanjutan melalui pengembangan usaha produktif yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Pendekatan ini memastikan bahwa rumah tangga tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi memiliki sumber penghidupan yang stabil. Dengan memaksimalkan komoditas unggulan seperti pertanian di Daha, peternakan di Murung Raya, serta wisata di Loksado intervensi ekonomi dapat memberikan hasil yang lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.

4. Pilar 4. Peningkatan SDM, Pendidikan, dan Literasi Keuangan

Pilar ini memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan. Penguatan kualitas manusia, keterampilan, dan

literasi finansial menjadi prasyarat agar rumah tangga tidak kembali jatuh ke kemiskinan ekstrem. Pilar ke 4 penting karena:

- a. Temuan lapangan menunjukkan beberapa desa masih menghadapi risiko putus sekolah.
- b. Banyak rumah tangga tidak memiliki pencatatan keuangan, sehingga pendapatan mudah habis.
- c. Perempuan memainkan peran besar sebagai pencari nafkah di desa urban seperti Gambah Luar.

Arah kebijakan yang dapat ditempuh:

- a. Pencegahan Putus Sekolah
Dukungan biaya pendidikan, transportasi, dan beasiswa khusus bagi anak keluarga miskin ekstrem.
- b. Pelatihan Keterampilan Kerja
Keterampilan berbasis potensi desa: peternakan, menjahit, kuliner, kerajinan, dan pemandu wisata.
- c. Literasi Keuangan Dasar dan Usaha
Pelatihan pencatatan usaha, pengelolaan hutang, dan kebiasaan menabung.
- d. Pemberdayaan Perempuan
Program usaha rumahan dan kelompok perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga.
- e. Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan
Program Paket A–C, kursus, dan pelatihan vokasi desa bagi rumah tangga usia kerja.

Fokus utama pilar ini adalah memperkuat kualitas manusia agar rumah tangga mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Pengembangan keterampilan, peningkatan pendidikan, dan literasi keuangan membantu keluarga menjadi lebih adaptif dalam menghadapi perubahan ekonomi. Dengan kualitas SDM yang lebih baik, rumah tangga tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memanfaatkan peluang usaha dan keluar dari kemiskinan secara permanen.

Keempat pilar ini membentuk kerangka kerja yang lengkap dimulai dari perbaikan layanan dasar, penguatan jaring pengaman sosial, peningkatan pendapatan, hingga kualitas SDM. Pada bagian berikutnya, strategi ini dijabarkan ke dalam agenda jangka pendek (≤ 12 bulan) dan agenda jangka menengah–panjang (1–5 tahun) untuk

mengarahkan implementasi kebijakan secara konkret sesuai prioritas wilayah dan kebutuhan rumah tangga miskin ekstrem

4.3.3. Strategi Jangka Pendek (≤ 12 Bulan)

Strategi jangka pendek berfungsi sebagai langkah percepatan untuk memperbaiki fondasi program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam waktu cepat. Fokus utamanya adalah memastikan data benar, sasaran tepat, serta mencegah risiko baru seperti putus sekolah atau penurunan konsumsi rumah tangga. Seluruh tindakan pada fase ini dapat dilaksanakan dalam kurun satu tahun dengan koordinasi lintas OPD dan pemerintah desa.

1. Validasi Cepat Data Penghasilan Rumah Tangga (Spot Check & Audit Kuesioner)

Validasi cepat menjadi langkah awal yang perlu diprioritaskan karena temuan lapangan menunjukkan masih adanya *under-reporting* pendapatan, data lama yang belum diperbarui, serta ketidaksesuaian antara kondisi rumah tangga dengan informasi administrasi. Akurasi data sangat menentukan arah intervensi, sehingga proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Spot check lapangan digunakan untuk memastikan informasi penghasilan benar-benar mencerminkan kondisi aktual rumah tangga. Audit kuesioner membantu mengidentifikasi data yang meragukan atau tidak lengkap, sehingga dapat segera dikonfirmasi kembali. Proses ini kemudian dilengkapi dengan validasi melalui musyawarah desa agar hasil verifikasi bersifat terbuka dan akuntabel. Data yang sudah bersih dan terverifikasi ini menjadi fondasi seluruh intervensi berikutnya, baik dalam perencanaan bantuan sosial, penentuan rumah tangga prioritas, maupun program pemberdayaan ekonomi. Tanpa data yang akurat, risiko salah sasaran meningkat, program produktif dapat keliru arah, dan anggaran menjadi kurang efektif.

2. Penajaman Targeting Bantuan Sosial (Mekanisme Top-Up Berbasis Selisih Garis Kemiskinan)

Peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah benar-benar diterima oleh rumah tangga yang paling membutuhkan. Mekanisme top-up berbasis selisih dengan garis kemiskinan ekstrem memungkinkan bantuan diberikan secara proporsional: semakin rendah pendapatan rumah tangga, semakin besar dukungan yang

diberikan. Pendekatan ini memperbaiki pola bantuan yang selama ini cenderung seragam, padahal kondisi kerentanan antar rumah tangga berbeda.

Pelaksanaannya dimulai dengan menetapkan rumah tangga prioritas berdasarkan *verified income* yang telah diverifikasi melalui kunjungan lapangan. Rumah tangga dengan pendapatan jauh di bawah garis kemiskinan ekstrem menerima top-up bansos sebagai penguat konsumsi dasar. Pada saat yang sama, berbagai skema bantuan seperti PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan. Strategi ini juga mengidentifikasi rumah tangga yang sudah relatif stabil, terutama dari *Cluster 2*, untuk diarahkan kepada proses graduasi bertahap. Dengan demikian, bantuan sosial berfungsi sebagai *shock absorber* yang melindungi keluarga dari krisis, namun tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang. Pendekatan yang lebih presisi ini membantu memaksimalkan efektivitas anggaran, sekaligus memastikan bahwa rumah tangga miskin ekstrem mendapat dukungan yang sesuai dengan tingkat kerentanannya.

3. Bantuan Pendidikan dan Transportasi untuk Mencegah Putus Sekolah

Risiko putus sekolah menjadi perhatian penting di beberapa desa, terutama pada keluarga yang menghadapi keterbatasan biaya transportasi, peralatan sekolah, atau hambatan akses geografis. Kondisi ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi, karena anak-anak yang keluar dari sekolah cenderung memiliki peluang ekonomi yang jauh lebih rendah di masa depan. Untuk mencegah risiko tersebut, intervensi pendidikan dirancang sebagai langkah pencegahan dini yang langsung menyasar hambatan-hambatan utama yang dialami rumah tangga miskin ekstrem. Berbagai bentuk dukungan diberikan sesuai kebutuhan lapangan. Bantuan biaya transportasi sekolah diprioritaskan untuk anak-anak di wilayah dengan jarak tempuh jauh atau akses fisik yang sulit, seperti desa di kawasan pegunungan. Perlengkapan sekolah dan kebutuhan dasar lainnya disediakan untuk memastikan anak-anak tetap dapat mengikuti kegiatan belajar tanpa kendala biaya. Tim lapangan juga melakukan penelusuran terhadap anak yang terindikasi berisiko putus sekolah, melalui kunjungan langsung dan koordinasi dengan pihak sekolah.

Intervensi ini dilengkapi dengan penguatan pemantauan kehadiran dan partisipasi sekolah bekerja sama dengan perangkat desa dan dinas pendidikan. Dengan demikian, pencegahan putus sekolah tidak hanya mengatasi hambatan biaya,

tetapi juga memastikan keberlanjutan dukungan melalui pengawasan terstruktur. Mengingat kemiskinan ekstrem cenderung menurun secara signifikan ketika pendidikan meningkat, langkah ini menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan di tingkat rumah tangga maupun desa.

4. Integrasi Data Lintas Basis (DTKS–P3KE–Regsosek–BNBA)

Integrasi data merupakan fondasi utama untuk memastikan seluruh program penanganan kemiskinan ekstrem berjalan presisi dan tidak tumpang tindih. Temuan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi aktual, perbedaan antar basis data, serta duplikasi penerima pada beberapa skema bantuan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efektivitas intervensi, tetapi juga berpotensi menyebabkan salah sasaran dan pemborosan anggaran. Karena itu, integrasi data lintas basis menjadi langkah strategis yang harus segera diperkuat. Proses integrasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data DTKS, P3KE, Regsosek, BNBA 2024, serta hasil verifikasi lapangan ke dalam satu sistem *data master* tingkat kabupaten yang dapat diakses lintas OPD sebagai rujukan tunggal. Data yang sudah terintegrasi kemudian diperbarui secara rutin setiap 6–12 bulan agar tetap akurat, mencerminkan dinamika ekonomi rumah tangga, dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial. Untuk mendukung implementasi, pemerintah daerah menyusun dashboard monitoring yang memuat status pergerakan rumah tangga baik yang masuk ke kategori miskin ekstrem maupun yang berhasil keluar dari kategori tersebut. Dashboard ini memudahkan perencanaan program, memantau efektivitas intervensi, dan menyediakan informasi real-time bagi pengambil kebijakan. Dengan sistem data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih harmonis, mengurangi risiko salah sasaran, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem. Integrasi data ini pada akhirnya menjadi kunci untuk memastikan setiap intervensi benar-benar menjangkau rumah tangga yang paling membutuhkan.

Fokus Utama Strategi Jangka Pendek

Tahap jangka pendek berfokus pada stabilisasi kebutuhan dasar rumah tangga miskin ekstrem serta memperbaiki fondasi teknis yang menentukan keberhasilan intervensi berikutnya. Prioritas utamanya adalah menjaga konsumsi dasar agar tidak terjadi penurunan kesejahteraan, memastikan seluruh bentuk bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, serta mencegah munculnya kerentanan baru seperti putus

sekolah atau kesenjangan layanan dasar. Dengan data yang valid, sistem targeting yang presisi, dan perlindungan sosial yang bekerja efektif, pemerintah daerah memiliki pijakan kuat untuk melanjutkan intervensi jangka menengah—terutama program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas usaha rumah tangga—secara lebih terarah dan berdampak. Ini memastikan bahwa proses penurunan kemiskinan ekstrem tidak hanya cepat tetapi juga berkelanjutan.

4.3.4. Strategi Jangka Menengah–Panjang (1–5 Tahun)

Strategi jangka menengah–panjang diarahkan untuk memastikan penurunan kemiskinan ekstrem berlangsung berkelanjutan. Setelah fondasi data, layanan dasar, dan perlindungan sosial diperkuat pada tahap jangka pendek, fase ini berfokus pada peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga, perubahan perilaku, serta penguatan sistem tata kelola agar kemiskinan ekstrem tidak muncul kembali. Pendekatan ini menuntut konsistensi kebijakan, integrasi lintas perangkat daerah, dan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan.

1. Penguatan Usaha Mikro dan Wirausaha Baru Berbasis Potensi Lokal

Intervensi jangka menengah memprioritaskan peningkatan pendapatan rumah tangga melalui pengembangan usaha mikro dan pembentukan wirausaha baru. Temuan lapangan dan analisis *Cluster* menunjukkan bahwa wilayah HSS memiliki potensi ekonomi yang kuat mulai dari pertanian di kawasan Daha, peternakan kambing di Murung Raya, hingga ekowisata di Loksado. Potensi ini menjadi landasan utama bagi strategi pemberdayaan ekonomi produktif. Arah implementasi:

- a. Pembentukan usaha mikro baru melalui pelatihan teknis, pendampingan, dan fasilitasi modal awal.
- b. Pengembangan usaha produktif berbasis komoditas unggulan tiap *Cluster*.
- c. Integrasi usaha kecil dengan pasar lokal dan regional melalui BUMDes, koperasi, dan kemitraan off-taker.
- d. Penguatan rantai nilai (*value chain*) sehingga usaha tidak hanya bergantung pada penjualan dasar, tetapi dapat menghasilkan nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, atau jasa pendukung lainnya.
- e. Pendampingan usaha jangka menengah agar rumah tangga benar-benar mampu naik kelas dan tidak kembali ke kategori miskin ekstrem.

Pendekatan ini memastikan rumah tangga tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

2. Kampanye Perubahan Perilaku dan Penguatan Kesadaran Pendidikan

Perubahan perilaku menjadi komponen kunci dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem yang berkelanjutan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa rumah tangga memiliki perilaku ekonomi yang cenderung risk-averse, minim pencatatan keuangan, serta kesadaran pendidikan yang belum merata. Ruang lingkup strategi:

- a. Kampanye kesadaran pendidikan untuk mengurangi risiko putus sekolah dan memastikan anak dari rumah tangga miskin ekstrem menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun.
- b. Peningkatan literasi keuangan bagi rumah tangga, terutama tentang pengelolaan pendapatan, pencatatan usaha, dan kebiasaan menabung.
- c. Edukasi kesehatan dan sanitasi sebagai bagian dari penguatan layanan dasar jangka panjang.
- d. Penguatan peran kelompok perempuan, pemuda, dan komunitas lokal dalam mengubah perilaku ekonomi dan sosial masyarakat.

Transformasi perilaku yang terarah ini memastikan program ekonomi maupun sosial dapat berjalan lebih efektif dan diterima secara luas.

3. SOP Pembaruan Desil per 6–12 Bulan dan Dashboard Monitoring (Monev)

Keberlanjutan penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan sistem tata kelola yang kuat, transparan, dan adaptif. Karena kondisi rumah tangga dapat berubah secara cepat akibat musim, pekerjaan, atau faktor kesehatan, pemerintah daerah memerlukan mekanisme pembaruan data yang dinamis dan dapat dipantau secara berkala. Langkah strategis:

- a. Menyusun SOP pembaruan desil secara terjadwal setiap 6–12 bulan untuk memastikan status rumah tangga selalu akurat.
- b. Pembentukan dashboard monitoring yang menampilkan data real-time mengenai perubahan status rumah tangga miskin ekstrem (masuk–keluar–bertahan).
- c. Penguatan peran OPD, kecamatan, dan desa dalam proses monitoring dan verifikasi lapangan.

d. Penyusunan mekanisme respon cepat (rapid response mechanism) untuk menangani rumah tangga yang tiba-tiba jatuh miskin akibat kejadian tak terduga.

e. Pemanfaatan dashboard sebagai alat pengendali program mulai dari bansos, pemberdayaan ekonomi, hingga intervensi layanan dasar.

Melalui tata kelola data yang kuat dan sistem monitoring yang transparan, kebijakan pemerintah dapat lebih responsif, akurat, dan berdampak.

4.4. Benchmark

Berikut ada pembelajaran dari sejumlah daerah yang telah menunjukkan kinerja baik dalam menurunkan kemiskinan ekstrem. Benchmark ini penting untuk memberikan perspektif komparatif dan mengidentifikasi elemen strategi yang dapat direplikasi maupun disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Daerah-daerah seperti Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jombang, dan Provinsi Jawa Timur dipilih karena terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Masing-masing wilayah memiliki pendekatan berbeda sesuai karakteristik sosial-ekonomi dan kapasitas kelembagaan, namun seluruhnya menunjukkan pola konsisten: penggunaan data yang akurat, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Benchmark ini memberikan gambaran mengenai strategi apa saja yang efektif dalam memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperbaiki tata kelola program kemiskinan ekstrem. Hasil pembelajaran ini menjadi rujukan penting dalam merancang strategi kebijakan HSS yang lebih presisi dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Tabel 14. *Best Practices* Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Daerah	Strategi Utama	Uraian / Implementasi Spesifik	Sumber Data / Referensi
Kabupaten Bekasi	a. Reformasi birokrasi tematik kemiskinan ekstrem	Pemerintah daerah menyusun kebijakan tematik berbasis data untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, termasuk	bekasikab.go.id

		mengintegrasikan program lintas OPD.	
	b. Verifikasi Data P3KE dan pensasaran berbasis rumah tangga	Verifikasi data penerima manfaat melalui <i>Platform Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)</i> , agar intervensi lebih tepat sasaran.	prokopim.bekasikab.go.id
	c. Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal (DIF)	Bekasi menerima DIF Rp 18,13 miliar dari Kemenkeu sebagai penghargaan dan digunakan kembali untuk memperluas program penghapusan kemiskinan ekstrem.	antaranews.com
	d. Kolaborasi multi-pihak dan CSR	Menggandeng dunia usaha (CSR) dan masyarakat dalam mendukung program peningkatan pendapatan rumah tangga miskin ekstrem.	tirtabhagasasi.co.id
Provinsi Jawa Tengah	a. Konvergensi program lintas sektor	Integrasi program kemiskinan lintas sektor (sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi) dengan target rumah tangga miskin ekstrem.	humas.jatengprov.go.id
	b. Optimalisasi data P3KE & pemutakhiran by-name-by-address	Menggunakan dan memutakhirkan data pensasaran keluarga miskin ekstrem untuk menghindari tumpang tindih bantuan.	humas.jatengprov.go.id
	c. Insentif fiskal dan pelibatan kabupaten/kota	18 kabupaten/kota di Jateng menerima insentif fiskal Rp 101,6 miliar; program difokuskan untuk	dinsos.jatimprov.go.id

		penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.	
	d. Sinergi dengan BAZNAS dan lembaga sosial	Pemprov Jateng berkolaborasi dengan BAZNAS dan filantropi untuk menutup celah pendanaan program kemiskinan ekstrem.	humas.jatengprov.go.id
Kabupaten Jombang	a. Penggunaan Data Tunggal (by-name, by-address, by-problem)	Pembangunan basis data terpadu untuk meminimalisir tumpang tindih bantuan dan memastikan intervensi tepat sasaran.	jombangkab.go.id
	b. Kolaborasi 4K (Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, Komunikasi)	Pendekatan kolaboratif lintas instansi dan sektor swasta, media, serta masyarakat sipil untuk sinkronisasi intervensi.	jombangkab.go.id
	c. Program pemberdayaan ekonomi lokal	Fokus pada pertanian, UMKM, dan padat karya, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk menaikkan pendapatan keluarga miskin.	metrosurya.com
	d. Target 0% kemiskinan ekstrem 2026 & monitoring berkala	Menetapkan target eliminasi kemiskinan ekstrem tahun 2026 dengan pemantauan kinerja per triwulan.	jawapos.com
Provinsi Jawa Timur	a. Konvergensi dan sinkronisasi program lintas sektor	Mengintegrasikan intervensi dari berbagai OPD dan kabupaten/kota untuk penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting.	dinsos.jatimprov.go.id
	b. Percepatan penyaluran	Mempercepat dan memperluas distribusi	dinsos.jatimprov.go.id

	bantuan sosial (bansos) produktif	bantuan sosial produktif kepada rumah tangga miskin ekstrem.	
	c. Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal (Rp 62 miliar)	DIF digunakan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota.	dinsos.jatimprov.go.id
	d. Pelibatan pilar kesejahteraan sosial dan dunia usaha	Mengoptimalkan peran TKSK, Karang Taruna, CSR, serta lembaga zakat dalam intervensi kemiskinan ekstrem di daerah.	dinsos.jatimprov.go.id
	e. Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal (Rp 62 miliar)	DIF digunakan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota.	dinsos.jatimprov.go.id

Benchmark dari empat wilayah di atas memperlihatkan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan ekstrem sangat ditentukan oleh tiga aspek utama: ketepatan data, kekuatan kolaborasi, dan kemampuan daerah mengarahkan sumber daya pada intervensi prioritas. Kabupaten Bekasi menonjol melalui reformasi birokrasi tematik dan pemanfaatan Dana Insentif Fiskal (DIF) secara terarah. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi contoh keberhasilan dalam mengintegrasikan program lintas sektor dan memperkuat peran jejaring kesejahteraan sosial. Sementara Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa penggunaan data tunggal dan kolaborasi multipihak dapat mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di tingkat desa. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa strategi penanganan kemiskinan ekstrem tidak dapat bertumpu pada satu program saja, tetapi memerlukan integrasi antara tata kelola data, intervensi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pendanaan daerah yang dikelola secara adaptif. Hal ini memberikan dasar kuat bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk merancang kebijakan yang lebih terarah, dengan menggabungkan praktik baik

nasional dan menyesuaikannya dengan karakteristik tiga *Cluster* kemiskinan ekstrem yang telah teridentifikasi dalam kajian ini.

BAB VI

REKOMENDASI DAN PENUTUP

6.1. Rekomendasi Kebijakan Daerah

Rekomendasi kebijakan berikut disusun berdasarkan temuan lapangan, analisis *Cluster* desa, pemetaan SWOT daerah, serta *benchmark* dari sejumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem. Fokus utama rekomendasi adalah memperkuat tata kelola, memastikan ketepatan sasaran, dan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin ekstrem secara berkelanjutan.

1. Penguatan Kapasitas TKPK dan Koordinasi Data Lintas OPD

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai koordinator utama lintas sektor. Penguatan ini mencakup konsolidasi perencanaan antar-OPD, peningkatan kapasitas analisis data, dan integrasi program melalui satu platform data terpadu. Model koordinasi aktif seperti yang diterapkan Kabupaten Jombang melalui mekanisme *4K* (Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, Komunikasi) dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki tata kelola penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat kabupaten.

2. Sinkronisasi Indikator dan Definisi Kemiskinan dengan BPS

Perbedaan antara data DTKS, P3KE, dan Regsosek menimbulkan tumpang tindih data rumah tangga miskin ekstrem. Karena itu, sinkronisasi definisi, indikator, dan mekanisme penilaian kemiskinan dengan Badan Pusat Statistik perlu dilakukan secara rutin. Penyesuaian ini mencakup pengukuran penghasilan berdasarkan kebutuhan dasar minimum, standardisasi desil, serta verifikasi rumah tangga melalui pendekatan *by name, by address, by problem*.

3. Implementasi Program “Graduation” bagi Rumah Tangga Stabil tetapi Rentan

Rumah tangga yang masuk kategori stabil tetapi stagnan (*Cluster 2*) membutuhkan model pendampingan jangka menengah berupa *graduation program*. Langkah ini mencakup pendampingan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan ultra-mikro, dan penguatan peran BUMDes serta koperasi sebagai agregator pasar. Praktik serupa telah digunakan oleh beberapa daerah seperti Jombang dan Bekasi untuk menurunkan

ketergantungan bansos dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui kegiatan produktif.

6.2. Kesimpulan Umum

Kajian ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukan ditandai oleh kondisi kelaparan akut, tetapi lebih disebabkan oleh deprivasi layanan dasar, pendapatan yang stagnan, dan ketergantungan struktural pada bantuan sosial. Kondisi ini berbeda antar wilayah dan membentuk tiga *Cluster* utama: desa dengan kekurangan layanan dasar, desa yang relatif stabil namun stagnan secara ekonomi, dan desa dengan potensi ekonomi komoditas.

Penanganan kemiskinan ekstrem di HSS memerlukan pendekatan yang tidak tunggal. Diperlukan kombinasi intervensi *protection* (perlindungan sosial), *promotion* (pemberdayaan ekonomi), dan *graduation* (pengurangan ketergantungan). Ketiga pendekatan ini dapat berjalan optimal ketika dibangun di atas data yang akurat, koordinasi antar-OPD, dan desain intervensi berbasis klaster wilayah.

Kesimpulan pada kajian ini disesuaikan dengan tujuan kajian.

1. Tujuan pertama adalah identifikasi profil kemiskinan ekstrem di kabupaten HSS dengan data terbaru. Tren kemiskinan di HSS konsisten menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kemiskinan ekstrem juga mengalami perbaikan. Kemiskinan ekstrem tahun 2022 sebesar 0,78% sedangkan tahun 2023 sebesar 0,65% (turun 0,13 poin persentase). Namun angka ini masih sedikit di atas rata-rata provinsi.
2. Tujuan kedua adalah menganalisis *Cluster* dan SWOT. Hasil analisis ini diperoleh 3 *Cluster* yang terdiri dari : (a) *Cluster* 1: Deprivasi Layanan Dasar, (b) *Cluster* 2: Pekerja Informal Berbasis Potensi Lokal dan (3) *Cluster* 3: Rumah Tangga Stabil tapi Rentan (Ketergantungan Bantuan). Analisis SWOT Program Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut. *Strengths*: daya juang masyarakat, dukungan program PKH/BLT. *Weaknesses*: ketergantungan bantuan, tata kelola lemah, kesadaran pendidikan rendah. *Opportunities*: potensi peternakan, UMKM, dukungan nasional. *Threats*: stagnasi kesejahteraan, maladministrasi bantuan, keterbatasan data valid. Integrasi *Cluster*–SWOT. Strategi intervensi berdasarkan hasil analisis per klaster.
3. Tujuan ketiga adalah strategi penanganan kemiskinan ekstrem. Tujuan ini terkait dengan target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2029. Strategi dihasilkan

adalah strategi utama, strategi jangka pendek dan menengah panjang. Strategi utama adalah sebagai berikut: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Bansos, Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Rumah Layak Huni, Pemberdayaan Ekonomi Lokal (KUR, UMKM, ternak, koperasi) dan Peningkatan SDM, Pendidikan, dan Literasi Keuangan.

4. Tujuan keempat adalah menganalisis strategi pengentasan kemiskinan ekstrem yang telah dilaksanakan daerah-daerah lain. Daerah-daerah yang dijadikan *benchmark* diantaranya adalah Jombang dan Jawa Tengah. Strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di Jombang adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan Data Tunggal (*by-name, by-address, by-problem*) melalui pembangunan basis data terpadu. Kedua, pendekatan Kolaborasi 4K — Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi — dilakukan secara lintas instansi, sektor swasta, media, serta masyarakat sipil untuk sinkronisasi intervensi. Ketiga, Kabupaten Jombang juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi lokal, yang fokus pada pertanian, UMKM, dan padat karya, serta meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk menambah pendapatan keluarga miskin.

Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem melalui beberapa strategi utama. Pertama, konvergensi program lintas sektor dilakukan dengan mengintegrasikan program sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk mencapai target rumah tangga miskin ekstrem. Kedua, optimalisasi data P3KE dan pemutakhiran data *by-name-by-address* diterapkan dengan menggunakan dan memperbarui data pendataan keluarga miskin ekstrem agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih. Ketiga, insentif fiskal dan pelibatan kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan insentif fiskal sebesar Rp 101,6 miliar kepada 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan program yang difokuskan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Keempat, Pemprov Jawa Tengah menjalin sinergi dengan BAZNAS dan lembaga sosial lainnya untuk menutup celah pendanaan program kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi dengan filantropi.

DAFTAR PUSTAKA


- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023, March 17). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2025, January 15). *Profil Kemiskinan Kalimantan Selatan 2024*. <https://kalsel.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1989/profil-kemiskinan-kalimantan-selatan-september-2024.html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706QP063OA>
- Cresswell, J. W. (1994). A Framework for Design: Qualitative, Quantitative, and mixed Methods Approaches. In *Research Design* (pp. 3–26).
- Cresswell, J. W. (1998). Five Qualitative Traditions of Inquiry. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*, chapter 4, 47–73.
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 5th Edition*. Thousand Oaks: Sage Publications Ltd. https://library.bangor.ac.uk/permalink/44WHELF_BANG/m8v489/alma991005385161202422
- Emet, G., & Merba, T. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006. <https://doi.org/10.17719/JISR.2017.1832>
- Everitt, B. S., Landau, S., Leese, M., & Stahl, D. (2011a). *Cluster Analysis*, 5th Edition. *Cluster Analysis, 5th Edition*, 1–330. <https://doi.org/10.1002/9780470977811>
- Everitt, B. S., Landau, S., Leese, M., & Stahl, D. (2011b). *Cluster Analysis*, 5th Edition. *Cluster Analysis, 5th Edition*, 1–330. <https://doi.org/10.1002/9780470977811>
- Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. L. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*. <https://doi.org/10.4135/9781506374680>
- Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis – where are we now?: A review of academic research from the last decade. *Journal of Strategy and Management*, 3(3), 215–251. <https://doi.org/10.1108/17554251011064837>
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. *Educational Researcher*, 33(7), 14–26. <https://doi.org/10.3102/0013189X033007014>
- Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (2005). *Finding Groups in Data An Introduction to Cluster Analysis*. John Wiley & Sons, Inc.

- Lewis, Oscar. (1966). *La vida : a Puerto Rican family in the culture of poverty--San Juan and New York*. 669.
- MacQueen, J. (1965). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability (June 21-July 18, 1965 and December 27, 1965-January 7, 1966)*. <https://digicoll.lib.berkeley.edu/record/113015>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nations, U. (2022). Human Development Report 2021-22. *Human Development Reports*.
- PMK Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pub. L. No. PMK Nomor 30 Tahun 2022 (2022).
- World Bank Group. (2022, December 5). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. <https://documents.worldbank.org/>; The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1893-6>
- Ravallion, M. (2020). On measuring global poverty. *Annual Review of Economics*, 12(Volume 12, 2020), 167–188. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-ECONOMICS-081919-022924/CITE/REFWORKS>
- Sarstedt, M., & Mooi, E. (2019). *A Concise Guide to Market Research*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56707-4>
- Sen, A. (2009). Development as Freedom. *English*, 1990, 1–57.
- Suryahadi, A. , Izzati, R. A. , & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty An Estimation for Indonesia*. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3102936>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Person. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/economic-development/P200000006431/9780137614813>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (Thirteenth edition p). Pearson.

LAMPIRAN
LOGBOOK KEGIATAN LAPANGAN
PENAGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KAB. HSS




Koordinator Tim Lapangan	:	Mellani Yulastina, SE., M.Ak., Ak., CA,. CiQAR
AnggotaTA	:	Achmad Ramadhanna'il Rasjava S.Si., M.Si
Anggota Tim Lapangan	:	1) Rezky Amalia 2) Muhammad Baihaqi 3) Luthfi Nor Anshori 4) Muhammad Fahrul Najab 5) Anugerah Wilson Marpaung


No .	Hari/tanggal	Lokasi/instansi yang dituju	Deskripsi Kegiatan	Dokumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Jumat, 19-09-2025	Bappedalitbangda Hulu Sungai Selatan	<p>Tim melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedatangan kami disambut secara langsung oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bapak H. M. Afif Bizri, S.H., M.Hum.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, dilakukan koordinasi terkait penentuan wilayah yang akan menjadi lokasi tujuan kegiatan serta jumlah sampel yang akan diambil. Melalui diskusi ini, tim memperoleh arahan dan gambaran</p>	 <p>Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia Jalan Jenderal Achenat Yani, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211, Indonesia Lat: -2.782280, Long: 115.263070 03/19/2025 11:37 AM GMT+08.00 Note: Captured by GPS Map Camer</p>
---	-------------------	--------------------------------------	--	---

			awal mengenai daerah sasaran yang relevan dengan kebutuhan penelitian.	
2	Jumat, 19-09-2025	Kecamatan Kandangan, Desa Gambah Luar	<p>Setelah melakukan koordinasi di Bappedalitbangda, tim melanjutkan kegiatan ke Kecamatan Kandangan, Desa Gambah Luar. Tim terlebih dahulu berkunjung ke rumah Kepala Desa untuk melakukan audiensi sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan penelitian.</p> <p>Selanjutnya, Kepala Desa memfasilitasi tim dengan mengantarkan langsung ke rumah para Ketua RT setempat, guna memperkenalkan serta menjelaskan aktivitas penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah itu, tim diarahkan ke rumah warga yang menjadi sampel penelitian, sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan perencanaan.</p>	  

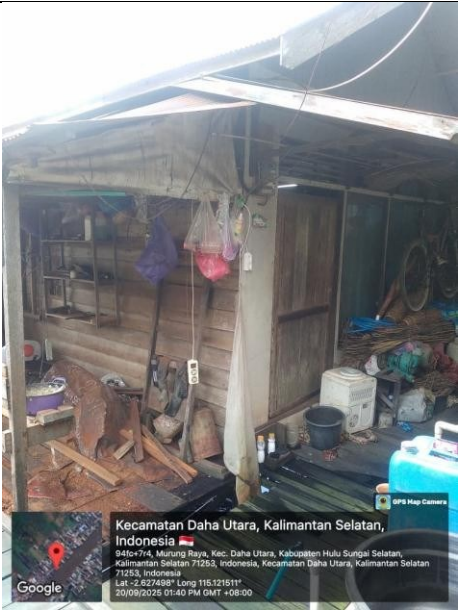

3	Jumat, 19-09-2025	Kecamatan Daha Selatan, Desa Baruh Jaya	<p>Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Daha Selatan, Desa Baruh Jaya. Pada kegiatan ini, tim didampingi oleh Saudara Dicky, staf Bappedalitbangda sekaligus warga asli Desa Baruh Jaya, sehingga memudahkan proses pendekatan dengan masyarakat setempat.</p> <p>Selain itu, tim juga mendapat pendampingan dari Ketua RT 06 Desa Baruh Jaya dalam rangka melakukan pengumpulan informasi dari warga desa yang menjadi responden. Kehadiran pihak lokal sangat membantu dalam memperlancar interaksi dengan masyarakat, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.</p>	 <p>The three photographs document the field research process. The top image shows an outdoor interaction with a local resident. The middle image shows an indoor interaction within a traditional wooden house. The bottom image shows an indoor interaction with a family, including a child. Each photo includes a Google Maps overlay with the location: Daha Selatan, South Kalimantan, Indonesia, and coordinates: 939+m89, Baruh Jaya, Daha Selatan, South Kalimantan 71253, Indonesia. The date and time are 19/09/2025 04:22 PM GMT +08:00.</p>
---	-------------------	---	--	--

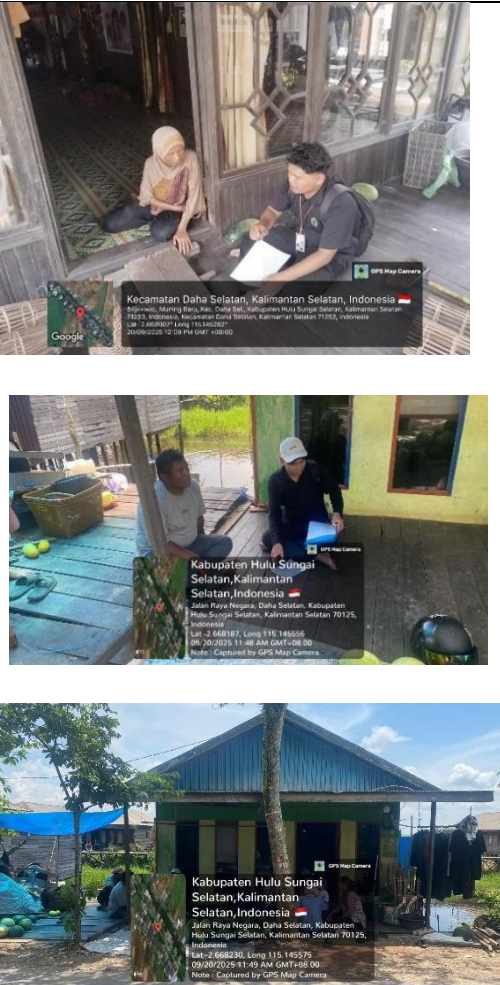
				  
--	--	--	--	--



No .	Hari/tanggal	Lokasi/instansi yang dituju	Deskripsi Kegiatan	Dokumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sabtu, 20-09-2025	Kecamatan Daha Utara, Desa Pakan Dalam	<p>Tim melaksanakan kegiatan di Kecamatan Daha Utara, tepatnya di Desa Pakan Dalam. Setibanya di desa, tim berkoordinasi dengan Bapak Ryan Riyadi, salah satu aparat desa setempat. Beliau memberikan arahan sekaligus mendampingi tim untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga yang menjadi sasaran kegiatan.</p> <p>Selanjutnya, tim juga difasilitasi untuk bertemu dengan Ketua RT 02 Desa Pakan Dalam, yang kemudian mendampingi tim dalam proses pengumpulan data dari warga di</p>	 <p>Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia Jalan Kali Negara, Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211, Indonesia Lat -2.621263, Long 115.103149 09/20/2025 11:25 AM GMT+08:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>

			<p>wilayah RT 02 tersebut. Kehadiran aparat desa dan Ketua RT sangat membantu dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat serta memperlancar kegiatan penelitian di lapangan.</p>	 <p>Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia Jorong Gilar, Jember, Dahanu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, 70125, Indonesia Lat: -2.521958, Long: 115.104037 09/20/2025 11:44 AM GMT+08:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>  <p>Kecamatan Dahanu Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia 64H3+69H, Jl. Tambak Batin, Pajala Dalam, Kec. Dahanu Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71253, Indonesia, Kecamatan Dahanu Utara, Kalimantan Selatan 71253, Indonesia Lat: -2.021863, Long: 115.103541 20/09/2025 11:23 AM GMT+08:00</p>
--	--	--	---	--

				
2	Sabtu, 20-09-2025	Kecamatan Daha Utara, Desa Murung Raya	<p>Setelah menyelesaikan kegiatan di Desa Pakan Dalam, tim melanjutkan perjalanan ke Desa Murung Raya. Di desa ini, tim terlebih dahulu berkoordinasi dengan salah satu aparat desa yang kemudian memfasilitasi dan mengarahkan tim menuju rumah-rumah warga yang menjadi tujuan pengumpulan data.</p> <p>Untuk mempercepat proses, tim kemudian dibagi menjadi dua kelompok dan menyebar ke beberapa titik yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil perbincangan dengan masyarakat, diperoleh informasi bahwa sebagian besar warga Desa Murung Raya bermata pencaharian sebagai pedagang soto berkelotok, yang merupakan salah satu ciri khas kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.</p>	 

				 <p>Kecamatan Daha Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia</p> <p>94fo+7r4, Murung Raya, Kec. Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71253, Indonesia, Kecamatan Daha Utara, Kalimantan Selatan 71253, Indonesia</p> <p>Lat -2.627488° Long 115.121511°</p> <p>20/09/2025 01:40 PM GMT +08:00</p>
				 <p>Kecamatan Daha Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia</p> <p>84fo+2gm, Jl. Sungai Geruda, Murung Raya, Kec. Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71253, Indonesia, Kecamatan Daha Utara, Kalimantan Selatan 71253, Indonesia</p> <p>Lat -2.627481° Long 115.121514°</p> <p>20/09/2025 01:53 PM GMT +08:00</p>

3	Sabtu, 20-09-2025	Kecamatan Daha Selatan, Desa Muning Baru	<p>Tim kemudian melanjutkan kegiatan ke Kecamatan Daha Selatan, Desa Muning Baru. Pada kunjungan ini, tim berkoordinasi dengan Sekretaris Desa (Sekdes), yang berperan sebagai penghubung sekaligus penyedia akses bagi tim dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sekdes dan salah satu warga juga menyertai tim menuju beberapa rumah warga yang ditetapkan sebagai sasaran penelitian.</p> <p>Melalui kunjungan tersebut, tim melakukan penelusuran data serta verifikasi langsung kepada warga untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat dan mendukung kebutuhan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan tim memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih mendalam.</p>	 <p>The top photograph shows a researcher in a dark shirt sitting on a wooden porch, engaged in conversation with a woman wearing a headscarf. A GPS overlay at the bottom identifies the location as Kecamatan Daha Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia, with coordinates 115.145207° Long and 3.668187° Lat.</p> <p>The middle photograph shows two researchers on a wooden platform; one is wearing a white shirt and the other a dark shirt and a cap. A GPS overlay identifies the location as Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia, with coordinates 115.145205° Long and 3.668230° Lat.</p> <p>The bottom photograph shows a researcher standing in front of a house with a blue corrugated metal roof. A GPS overlay identifies the location as Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia, with coordinates 115.145279° Long and 3.668230° Lat.</p>
---	-------------------	--	--	---



4	Sabtu, 20-09-2025	Kecamatan Daha Selatan, Desa Tambangan	<p>Perjalanan tim kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Daha Selatan, Desa Tambangan. Setibanya di lokasi, tim disambut oleh Sekretaris Desa (Sekdes) yang memberikan dukungan awal berupa penjelasan mengenai kondisi desa sekaligus mengarahkan tim menuju wilayah RT 01 dan RT 03 sebagai lokasi pengumpulan data.</p> <p>Selanjutnya, Ketua RT 01 dan Ketua RT 03 turut serta dalam kegiatan dengan memberikan pendampingan secara langsung kepada tim. Mereka berperan penting sebagai penghubung antara tim dengan masyarakat, dengan cara menunjukkan serta mengantarkan tim ke rumah-rumah warga yang telah ditetapkan sebagai responden penelitian.</p>	  
---	-------------------	--	--	--



No .	Hari/tanggal	Lokasi/instansi yang dituju	Deskripsi Kegiatan	Dokumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Minggu, 21-09-2025	Kecamatan Loksado, Desa Loksado	<p>Pada hari ini, tim melaksanakan kegiatan di Kecamatan Loksado, tepatnya di Desa Loksado. Sebelum keberangkatan, tim telah melakukan koordinasi awal dengan Sekretaris Desa (Sekdes) melalui komunikasi daring (WhatsApp). Dalam koordinasi tersebut, Sekdes memberikan informasi mengenai titik lokasi dan kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penelitian.</p> <p>Berdasarkan arahan tersebut, tim diarahkan untuk melakukan pengumpulan data di beberapa wilayah, yaitu RT 03, RT 02, serta di kawasan Balau Urui yang berada di RT 01. Informasi awal dari Sekdes ini sangat membantu dalam memfokuskan kegiatan lapangan, sehingga tim dapat menjangkau responden sesuai dengan rencana penelitian.</p>	 

2	Minggu, 21-09-2025	Kecamatan Loksado, Desa Lok Lahung	<p>Tim kemudian melanjutkan kegiatan ke Desa Lok Lahung di Kecamatan Loksado. Di desa ini, tim berinteraksi dengan warga yang menunjukkan sikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi. Melalui komunikasi awal tersebut, tim memperoleh keterangan mengenai titik-titik lokasi rumah warga yang relevan untuk dikunjungi sebagai responden penelitian.</p> <p>Berdasarkan arahan yang diberikan, tim selanjutnya bergerak menuju RT 01 untuk melakukan pengumpulan data secara langsung. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan informasi awal sangat membantu tim dalam mengefisienkan waktu, memperlancar proses pendataan, serta meningkatkan keakuratan informasi yang dihimpun.</p>	 
---	--------------------	------------------------------------	--	--

3	Minggu, 21-09-2025	Kecamatan Padang Batung, Desa Jembatan Merah	<p>Perjalanan tim selanjutnya berfokus di Kecamatan Padang Batung. Setibanya di lokasi, tim terlebih dahulu mendatangi kantor kecamatan untuk melakukan koordinasi sekaligus memperoleh informasi tambahan mengenai desa-desa yang menjadi sasaran penelitian. Dari hasil koordinasi tersebut, tim diarahkan menuju Desa Jembatan Merah sebagai titik kegiatan berikutnya.</p> <p>Di Desa Jembatan Merah, tim langsung melakukan proses pengumpulan data lapangan berdasarkan informasi dan rujukan yang diberikan oleh pihak kecamatan. Mekanisme ini memungkinkan tim untuk lebih terarah dalam menentukan responden, sekaligus memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kehadiran dukungan administratif dari kecamatan memberikan kontribusi penting dalam memperlancar jalannya kegiatan dan memperkuat validitas data lapangan yang dihimpun.</p>	 <p>Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basri, Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 70125, Indonesia Lat: -2.808231, Long: 115.289510 09/21/2025 12:53 PM GMT+08:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>  <p>Kecamatan Padang Batung, Kalimantan Selatan, Indonesia 577r+83, Jemb. Merah, Kec. Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217, Indonesia, Kecamatan Padang Batung, Kalimantan Selatan Lat: -2.809303° Long 115.290271° 21/09/2025 12:51 PM GMT +08:00</p>
---	--------------------	--	---	---

4	Minggu, 21-09-2025	Kecamatan Padang Batung, Desa Karang Jawa	<p>Tim melanjutkan perjalanan ke Desa Karang Jawa yang berada di Kecamatan Padang Batung. Pada kunjungan ini, tim secara langsung menuju RT 03 sebagai lokasi pertama pengumpulan data. Di wilayah tersebut, tim melakukan pendataan terhadap warga yang telah ditetapkan sebagai responden penelitian. Setelah kegiatan di RT 03 selesai, tim kemudian melanjutkan proses pendataan ke RT 02 dengan metode serupa.</p> <p>Akses menuju Desa Karang Jawa dapat dikategorikan cukup menantang. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang relatif terpencil dan sulit dijangkau, di mana jalur transportasi hanya memungkinkan untuk dilalui dengan kendaraan roda dua. Faktor keterpencilan ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan penelitian, karena turut memengaruhi mobilitas tim serta intensitas interaksi dengan masyarakat setempat.</p> <p>Meskipun demikian, keterbatasan akses tidak mengurangi efektivitas kegiatan lapangan. Justru, kondisi tersebut memberikan gambaran nyata mengenai tantangan geografis yang dihadapi masyarakat desa, sekaligus</p>	 <p>Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia Jalan Ambari, Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 70125, Indonesia Lat: -2.788526, Long: 115.294592 09/21/2025 01:37 PM GMT+08:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>  <p>Kecamatan Padang Batung, Kalimantan Selatan, Indonesia Karang Jawa, Kec. Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia Lat: -2.784672, Long: 115.283537 21/09/2025 01:13 PM GMT+08:00</p>  <p>Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia Jalan Ambari, Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 70125, Indonesia Lat: -2.788234, Long: 115.294334 09/21/2025 01:37 PM GMT+08:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>
---	--------------------	---	---	---

			memperkaya konteks hasil penelitian yang diperoleh.	
5	Minggu, 21-09-2025	Kecamatan Padang Batung, Desa Pandulangan	<p>Tim kemudian melanjutkan kegiatan ke Desa Pandulangan. Setibanya di lokasi, tim terlebih dahulu berkunjung ke kediaman Kepala Desa. Kehadiran tim disambut dengan baik oleh istri Kepala Desa, yang kemudian memberikan arahan mengenai titik-titik rumah warga yang ditetapkan sebagai sampel penelitian.</p> <p>Berdasarkan informasi tersebut, tim langsung bergerak menuju RT 02 untuk melakukan proses pengumpulan data lapangan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan ke RT 01, di mana tim memperoleh pendampingan dari Ketua RT setempat. Ketua RT secara langsung mengantarkan tim ke rumah-rumah warga yang menjadi responden, sehingga memperlancar proses interaksi dan pendataan.</p>	 

				 <p>Kecamatan Padang Batung, Kalimantan Selatan, Indonesia 68°19'3, Pandulan, Kec. Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia, Kecamatan Padang Batung, Kalimantan Selatan, Indonesia Lat -2.765293° Long 115.315037° 21/09/2025 03:10 PM GMT +08:00</p>
				 <p>Kecamatan Padang Batung, Kalimantan Selatan, Indonesia 68°8'6m5, Jl. Tanayung, Pandulan, Kec. Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71292, Indonesia, Kecamatan Padang Batung, Kalimantan Selatan 71292, Indonesia Lat -2.762505° Long 115.318349° 21/09/2025 03:30 PM GMT +08:00</p>